TABLOID Sinar Tani

TERBIT SETIAP HARI RABU
Harga Tabloid Cetak : Rp 16.000
E-paper : Rp 72.000/Tahun (48 edisi)
www.tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 081317575066
e-mail : redaksi@sinartani.co.id
www.sinartani.co.id

Edisi 12 - 18 November 2025
No. 4110
Tahun LVI



5 Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti: Regulasi Penyelenggaraan Penyuluhan Disesuaikan

10 Tim Koordinasi MBG Perkuat Posisi BGN

12 Kelapa, Saatnya Bangkit Kembali



SATU KOMANDO PENYULUH PERTANIAN



EDITORIAL

Pahlawan, Petani dan Penyuluh

10 November menjadi tanggal sakral bagi bangsa Indonesia. Pemerintah telah menetapkan sebagai Hari Pahlawan yang kemudian diperingati seluruh masyarakat di Tanah Air. Hari Pahlawan sendiri dipilih sesuai dengan waktu meletusnya pertempuran di Surabaya, Jawa Timur, yang dikenal sebagai Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945.

Pahlawan merupakan sebutan bagi mereka yang sangat berjasa bagi bangsa dan negara. Pahlawan tidak hanya mengorbankan waktu dan tenaga, namun juga rela mengorbankan nyawanya demi kepentingan bangsa serta negara.

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pahlawan dimaknai sebagai orang yang menonjol karena keberanian serta pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pahlawan adalah pejuang yang gagah berani. Dalam membela kebenaran, pahlawan harus mengorbankan tenaga, pemikiran, waktu, bahkan nyawa. Pahlawan tidak berjuang untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, serta negara.

Tahun ini pemerintah menetapkan ada 10 nama yang telah berjasa bagi negara sebagai pahlawan. Dua nama adalah mantan Presiden RI. Pertama, Jenderal Soeharto, Pahlawan dibidang Perjuangan Bersenjata dan Politik. Kedua, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dibidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam. Satu lagi adalah pejuang buruh yang hingga kini kasusnya masih gelap yakni Marsinah, pahlawan bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan.

Diantara nama-nama Pahlawan, satu profesi yang kerap disebut sebagai Pahlawan adalah Guru. Bahkan ada ungkapan Guru adalah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Ungkapan tersebut hampir selalu muncul dalam setiap pembahasan mengenai guru dan pendidikan, terutama saat Hari Guru. Julukan ini muncul dalam penggalan lirik lagu nasional, yakni "Hymne Guru.

Mengapa Guru dijuluki pahlawan tanpa tanda jasa, tidak lepas karena profesinya memberikan kontribusi besar bagi bangsa, sehingga layak disebut pahlawan. Namun, guru tidak pernah memperoleh tanda jasa seperti pahlawan-pahlawan nasional.

Sayangnya, dari sekian banyak kriteria penetapan seseorang sebagai Pahlawan, profesi petani dan penyuluh pertanian tak masuk dalam kategori seorang Pahlawan. Padahal petani dan penyuluh pertanian menjadi profesi yang sangat berjasa dalam menyediakan pangan bagi seluruh manusia di dunia.

Apalagi pangan kini bukan sekadar urusan perut, tapi juga menyangkut ketahanan bangsa. Ketahanan bangsa tidak akan terwujud tanpa adanya ketahanan pangan. Karena itu,pada Peringatan Hari Pahlawan, apresiasi patut kita berikan juga kepada seluruh pejuang pangan, mulai dari petani, penyuluh, hingga para inovator teknologi. Mereka adalah pahlawan masa kini yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Untuk itu, kepahlawanan harus dimaknai secara lebih luas dan kontekstual. Tidak hanya mereka yang berjuang di medan perang, namun juga mereka yang bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan bangsa. Wajar, kalau kita perlu memberi makna baru terhadap istilah pahlawan.

Peringatan Hari Pahlawan menjadi moment penting bagi kita untuk menghargai lebih besar jasa para pejuang pangan, petani dan penyuluh pertanian. Mereka memang tak meminta tanda jasa, tapi mereka perlu dukungan pemerintah agar produksi pangan berjalan dengan baik.

SAUNG TANI

MENTAN MENYAPA



Penyuluh, **Garda Depan** Swasembada Pangan

Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI

Penyuluh mulai tahun 2026 resmi menjadi bagian dari pemerintah pusat. Dengan demikian, penyuluh akan berada dalam satu komando. Karena itu, kami mengajak para penyuluh pertanian di seluruh Indonesia menjadi garda terdepan mengawal terwujudnya swasembada pangan nasional.

Kepada penyuluh pertanian di seluruh Indonesia, kami selalu menegaskan bahwa pertanian merupakan sektor strategis yang menentukan kedaulatan dan masa depan ekonomi bangsa. Indonesia dapat menjadi negara superpower ekonomi melalui penguatan sektor pertanian.

Tidak ada yang lebih menginginkan Indonesia maju dan berdaulat pangan selain kita sendiri. Pasarnya besar, potensinya besar, karena itu kita harus bergerak. Kalau kita diam, sama saja kita membiarkan rakyat kita sengsara.

Kami menekankan pentingnya peran penyuluh dalam memastikan distribusi pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta sarana produksi pertanian lainnya agar tepat waktu dan tepat sasaran. Kami berkomitmen memberantas praktik mafia pupuk serta memastikan kebijakan pertanian berjalan bersih dan adil di lapangan.

Tidak ada ampun bagi kios dan distributor pupuk yang melanggar aturan Harga Eceran Tertinggi (HET). Penindakan tegas sudah kami lakukan. Melalui Pupuk Indonesia, kami cabut izin 190 pengecer dan distributor yang terbukti tidak menurunkan harga pupuk sesuai pengumuman pemerintah, dan mereka tidak akan kami beri kesempatan lagi. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang bermain-main dengan kebijakan ini.

Pemerintah akan terus melakukan pengawasan ketat di lapangan untuk memastikan kebijakan penurunan harga pupuk benar-benar sampai kepada petani. Sudah cukup lama petani kita dizalimi oleh para mafia. Sekarang saatnya kita lawan. Negara harus berpihak pada petani. Kita lindungi 160 juta petani dari permainan-permainan kotor yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Pengawasan tidak berhenti di level pengecer dan distributor. Kepada seluruh manajer dan general manager Pupuk Indonesia di daerah untuk memastikan kepatuhan kebijakan di wilayahnya masing-masing. Karena itu, penyuluh adalah pertahanan kita. Saya ingin Anda semua merasa terhormat. Jika saya menghormati Anda, maka seluruh provinsi akan menghormati Anda.

Pemerintah secara resmi menurunkan HET pupuk bersubsidi hingga 20 persen berlaku mulai 22 Oktober 2025. Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 menjadi Rp1.800/kg, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840/kg, NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640/kg, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360/kg dan pupuk organik dari Rp 800 menjadi Rp 640/kg.

Kami juga ingin menyampaikan berbagai langkah strategis yang sedang ditempuh untuk menjaga kesinambungan produksi, mulai dari penguatan irigasi, optimalisasi lahan, hingga hilirisasi pertanian sebagai bagian dari strategi jangka panjang menciptakan lapangan kerja. Potensinya besar untuk menciptakan hingga 1,6 juta lapangan kerja baru dan memperkuat ekspor nonmigas yang sudah tumbuh 9,57 persen hingga September 2025.

Selain soal produksi dan hilirisasi, kami juga ingin menyampaikan laporan terkait kebijakan stabilisasi harga beras. Pemerintah, terus melanjutkan operasi pasar bersama Bulog untuk memastikan harga beras tetap berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Dua bulan terakhir harga beras mulai turun, namun kami tidak akan berhenti. Operasi pasar terus kami jalankan hingga seluruh harga di lapangan benar-benar stabil.

10 Nopember, bangsa Indonesia peringati Hari Pahlawan
- Petani juga pahlawan loh..

Tarik ke pusat, penyuluh daerah tetap bekerja di daerah masing-masing
- Penyuluh : Alhamdulillah...

Presiden lantik Rektor IPB Prof. Arif Satria jadi Kepala BRIN
- Selamat ya pak!

PINDAI BARCODE!
Untuk Mengakses e-paper Sinartani.



Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: BPPSDMP (diolah)

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto; **Redaktur Pelaksana :** Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden :** Wasis (Cilacap), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat); **Layoutman :** Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter**: Asrori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi:** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** Dewi Ratnawati; Indri; Echa Sinaga; **Keuangan:** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan** : Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi:** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari
Penerbit: PT. Duta Karya Swasta; Komisaris Utama: DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; **Komisaris:** Ir. Achmad Saubari Prasodjo
Direktur Utama: DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur:** Ir. Mulyono Machmur, MS
Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan: Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205
Email: redaksi@sinartani.co.id; **Izin Terbit** No. 208/SK/Menpen/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak:** Laksus Pangkopkamtibda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga:** Rp. 16.000 per edisi; **Tarif Iklan: FC** Rp. 8000/mmk, **BW** Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran:** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. No rekening 1270096016587; Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI'46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN:** 0852-8586;
Percetakan: PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika

Cokelat Nglanggeran, Bukti Hilirisasi Kakao Dimulai dari Desa



Di lereng Gunungkidul, petani Nglanggeran membuktikan bahwa hilirisasi tak harus menunggu pabrik besar. Dari biji kakao menjadi cokelat premium, desa kecil ini berhasil naik kelas lewat olahan sendiri.

Di banyak daerah, kakao masih dipandang sebatas komoditas mentah yang dijual ke pengepul. Berbeda halnya di Nglanggeran, sebuah desa di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih dari satu dekade terakhir, desa ini membuktikan bahwa hilirisasi tidak harus menunggu pabrik besar berdiri. Transformasi justru dimulai dari rumah produksi kecil, kerja kolektif petani, dan pendampingan penyuluh yang sabar membuka wawasan pelan-pelan.

Pada awal 2010-an, petani kakao di Nglanggeran hidup dalam pola lama: panen, jual gelondongan, selesai. Harga tergantung tengkulak, dan petani jarang tahu bagaimana biji mereka dinilai. Titik balik datang pada 2011, ketika penyuluh pertanian lapangan bersama pendamping PNPM dan Kementerian Desa mengajak para petani belajar pascapanen kakao.

Materi sederhana, fermentasi, pengeringan, dan sortasi, awalnya terasa asing. Namun begitu diterapkan, hasilnya langsung terasa. Harga biji fermentasi naik sekitar 20–30 persen dibandingkan menjual kakao gelondongan di pasar lokal Gunungkidul. Momentum ini menyalakan ide, kalau bisa fermentasi, mengapa tidak melangkah lebih jauh?

Langkah berikutnya diwujudkan dua tahun kemudian. Pada 2013, warga membentuk Kelompok Usaha Bersama (Kube) Coklat Nglanggeran dengan pendampingan Balai Penyuluhan Pertanian dan Dinas Pertanian DIY. Mereka belajar mengolah biji menjadi produk cokelat rumahan, mulai dari memanggang (roasting), menggiling (grinding), hingga menghaluskan adonan cokelat (*conching*) dan teknik tempering.

Desa Cokelat

Sejak saat itu, Nglanggeran mulai dikenal sebagai "desa cokelat", setelah produk mereka rutin tampil di pameran UMKM dan ajang pariwisata di Yogyakarta. Hilirisasi di Nglanggeran tumbuh organik, bukan proyek instan. Penyuluh dan pendamping desa mengawal tiap tahap: perbaikan mutu bahan baku, alat pengolahan yang sesuai skala desa, perizinan PIRT (Produk Industri Rumah Tangga), hingga kemasan yang layak masuk toko oleh-oleh.

Pada 2019 mencatat bahwa kolaborasi petani, penyuluh, dan Kelompok Sadar Wisata memberi warna baru. Cokelat tidak hanya dikemas sebagai produk makanan, tetapi juga pengalaman wisata edukasi di Desa Wisata Nglanggeran, yang kemudian meraih ASEAN Community Based Tourism Award 2017. Cokelat menjadi bagian dari paket wisata, bukan sekadar oleh-oleh.

Barisan produk Cokelat Nglanggeran kian lengkap. Selain cokelat batang, mereka memproduksi bubuk, minuman cokelat siap seduh, hingga selai dan es krim cokelat lokal. Tahun 2021 kapasitas produksi mencapai 600–800 batang per bulan, dengan margin jauh lebih tinggi dibanding sekadar menjual biji mentah. Produk mereka sudah menembus pasar Yogyakarta, Solo, hingga sebagian Jakarta melalui jejaring UMKM, toko oleh-oleh, dan kolaborasi event.

Keterlibatan Masyarakat

Rantai manfaatnya meluas ke banyak arah. Ibu-ibu desa terlibat dalam pengolahan dan pengemasan. Pemuda mendapatkan peran sebagai pemandu wisata dan tenaga pemasaran digital. Petani tetap menjadi tulang punggung penyedia bahan baku, namun kini dengan standar budidaya yang lebih baik. Penyuluh pertanian terus mendampingi petani agar kualitas biji tetap stabil dengan pemangkasan teratur, sanitasi kebun, pemupukan organik, dan pengendalian hama terpadu.

Pandemi sempat menekan kunjungan wisata, tetapi penyuluh kembali menjadi pemantik adaptasi. Mereka memfasilitasi pelatihan pemasaran digital bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Media sosial dan marketplace menjadi penopang penjualan saat wisatawan belum banyak kembali. Kesadaran ini menegaskan satu hal, hilirisasi di desa bukan hanya tentang produk, tetapi cara berpikir.

Kisah Nglanggeran menampar anggapan lama bahwa hilirisasi identik dengan pabrik skala besar dan investasi miliaran. Desa justru menunjukkan versi yang lebih merata manfaatnya. Nilai tambah tidak lari keluar daerah. Produk lahir di desa, dinikmati wisatawan di desa, uang berputar di desa. Model ini membuat banyak daerah mulai melirik langkah serupa.

Dari perjalanan ini, peran penyuluh begitu terasa. Mereka bukan sekadar memberi materi teknis, tetapi menyalakan keberanian untuk mencoba. Tanpa perubahan pola pikir petani, dari "jual apa adanya" menjadi "olah untuk bernilai" hilirisasi tak akan punya kaki.

Nglanggeran membuktikan bahwa ketika penyuluh, pemerintah daerah, dan warga berjalan seirama, kakao tidak lagi berhenti sebagai komoditas mentah. Ia naik kelas menjadi identitas desa, sumber ekonomi, bahkan kebanggaan kolektif.

Penulis : Takdir Mulyadi
Penyuluh Pertanian

Mengembalikan Kejayaan Tembakau Deli

CATATAN Begawan



Dalam upaya mengembalikan kejayaan komoditas legendaris Tembakau Deli, PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) yang merupakan bagian dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Medan.

Silaturahmi antara Region Head PTPN Regional 1, Didik Prasetyo, beserta jajaran dengan Wakil Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menjadi awal langkah strategis dalam agenda revitalisasi Tembakau Deli sebagai warisan ekonomi dan budaya yang pernah mendunia.

Seperti diungkapkan Didik Prasetyo , PTPN I Regional 1 siap berperan aktif dalam menghidupkan Kembali kejayaan "Emas Hijau Deli" melalui pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Untuk mendukung hal itu, pihaknya telah menyiapkan dan mencadangkan lahan seluas 500 ha.

Bukan hanya itu, PTPN Regional 1 juga telah berinvestasi cukup besar di sektor hulu dan hilir, termasuk membangun infrastruktur dan kebutuhan penunjang lainnya. Harapannya, reputasi Tembakau Deli kembali seperti masa kejayaannya dulu. Sinergi yang telah terjalin baik antara PTPN I dan Pemkot Medan diharapkan terus diperkuat agar Tembakau Deli kembali dikenal di pasar internasional.

Saat ini cerutu Deli Nusantara hadir dalam empat varian, yakni Helvetia Premium, Helvetia 1, Helvetia 2, dan Saentis. Sebagai wujud komitmen PTPN I Regional 1 dalam menghasilkan tembakau premium berstandar dunia.

Revitalisasi Tembakau Deli menjadi bagian dari strategi besar PTPN Regional 1 untuk menghidupkan kembali komoditas unggulan Nusantara. Potensi Tembakau Deli, bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga melestarikan warisan historis dan menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan. Karena itu, sinergi dengan Pemerintah Kota Medan menjadi kunci utama agar Tembakau Deli kembali mendunia.

Wakil Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas juga mengakui, Tembakau Deli merupakan warisan bersejarah Kota Medan. Dengan kolaborasi bersama PTPN I, dirinya berharap produk ini dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut kolaborasi, kedua pihak membahas pengembangan wadah penikmat cerutu di kawasan Nusa Dua Heritage, area bersejarah yang dahulu merupakan Rumah Sakit Tembakau Deli di pusat Kota Medan. Kawasan ini diharapkan menjadi destinasi wisata sejarah dan budaya tembakau sekaligus pusat promosi Cerutu Deli Nusantara.

SATU KOMANDO PENYULUH PERTANIAN

Sentralisasi penyuluh pertanian membuka babak baru. Setelah cukup lama berpisah dari pemerintah pusat dan berpindah ke daerah, mulai tahun 2026 penyuluh pertanian akan kembali menjadi bagian pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian.

Kebijakan ini diharap memperkuat peran penyuluh sebagai motor percepatan swasembada pangan di seluruh daerah. Apalagi pemerintah menekan gas poll untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Bukan hanya dalam watu 4-5 tahun, tapi 1-2 tahun mendatang target tersebut sudah bisa tergapai.

Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh pemerintah adalah menarik penyuluh pertanian dari daerah ke pusat. Kebijakan ini ditegaskan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Percepatan Swasembada Pangan.

Inpres yang diteken Presiden pada 4 Februari 2025 itu menugaskan Kementerian Pertanian mengambil alih penyuluh pertanian ASN yang sebelumnya berada di bawah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Langkah ini menarik perhatian banyak pihak, mulai dari kalangan daerah hingga para penyuluh sendiri. Dampaknya cukup luas, tak hanya soal status kepegawaian, tetapi juga menyangkut sistem penyuluhan secara nasional. Di balik kebijakan yang disebut-sebut sebagai "satu komando penyuluhan" ini, tersimpan harapan besar sekaligus pekerjaan rumah yang tak kecil.

Sebenarnya program swasembada pangan bukan hal baru, namun tuntutan zaman menjadikannya lebih mendesak karena kebutuhan pangan terus meningkat seiring peningkatan populasi penduduk. Apalagi adanya peringatan krisis pangan yang dilontarkan lembaga-lembaga dunia.

Kementerian Pertanian pun menjalankan berbagai strategi percepatan. Diantaranya, intensifikasi melalui penyediaan benih unggul, pupuk, pompanisasi dan optimalisasi lahan; ekstensifikasi dengan cetak sawah rakyat; revitalisasi irigasi; pertanian modern; serta pelibatan petani milenial lewat Brigade Pangan.

Karena itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengajak penyuluh pertanian menjadi garda terdepan mengawal terwujudnya swasembada pangan. Pentingnya peran penyuluh dalam memastikan distribusi pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta sarana produksi pertanian lainnya agar tepat waktu dan tepat sasaran.

Di sisi lain, Amran menegaskan dirinya memahami betul perjuangan para penyuluh karena pernah berada di posisi yang sama. "Saya paham sekali tugas dan perjuangan penyuluh, karena saya dulu juga pernah menjadi penyuluh. Tapi saya ingin sekarang penyuluh merasa bangga. Kalian adalah ujung tombak kemajuan bangsa," katanya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti berharap proses penarikan penyuluh pertanian daerah ke pusat berjalan lancar. Karena itu, ia mengingatkan kepada pemerintah daerah. Khususnya Dinas Pertanian tidak ada yang tertinggal. "Tolong dikawal jangan sampai ada yang ketinggal, karena nanti akan lama, bolak balik," katanya.

Penyuluh pertanian yang akan pindah menurutnya adalah ASN dan P3K. Nanun bagi penyuluh pertanian yang TPP-nya lebih tinggi dari tunjangan kinerja Kementerian Pertanian tidak akan dipindahkan. "Kenapa? Karena kita diingatkan Sekretariat Negara, jangan sampai kebijakan baru ini mengurangi kesejahteraan penyuluh pertanian," ujarnya.

Namun lanjut Santi, karena penyuluh pertanian menjadi jabatan tertutup, sehingga bagi yang tidak pindah harus beralih tidak menjadi penyuluh pertanian lagi, tapi bisa mengisi jabatan fungsional lain di Kementerian Pertanian. Misalnya, Pertugas Pengamat Organisme Penganggu Tumbuhan (PPOPT) atau Pengawas Benih Tanaman.

Santi juga menegaskan, bagi penyuluh yang nanti sudah menjadi pegawai pusat tidak perlu khawatir akan dipindahkan ke daerah lain. "Penyuluh akan tetap bekerja di wilayahnya masing-masing, di BPP tempat lokasinya sekarang ini," ujarnya.

Penyuluh jadi Kunci

Sementara itu Momon Rusmono, Dosen Polbangtan Bogor mengingatkan, semua program pemerintah untuk mencapai swasembada pangan akan sulit berhasil bila tidak dibarengi pendampingan yang kuat hingga tingkat petani. "Di sinilah peran penyuluh menjadi kunci," ujarnya.

Penyuluh adalah ujung tombak perubahan perilaku dan cara bertani. Mereka bukan hanya pembawa materi penyuluhan, tapi agen transformasi modernisasi pertanian. "Swasembada hanya akan terwujud bila penyuluh hadir, mengawal, mendampingi, dan memastikan petani mampu menerapkan inovasi," katanya.

Untuk memperkuat peran strategis tersebut, pemerintah mengambil langkah yang berani. Pada tahap pertama, sebanyak 30.318 penyuluh resmi dialihkan ke Kementan pada Agustus 2025. Tahap kedua dan ketiga ditargetkan selesai pada November 2025 sehingga seluruh penyuluh sudah berstatus pusat per 1 Januari 2026.

Momon mengatakan, ke depan pembenahan harus dilakukan bertahap dan cermat, mulai dari penyelarasan kebijakan, penyempurnaan kurikulum pelatihan, penyusunan mekanisme kerja baru, hingga penguatan alat kerja penyuluh. Tak kalah penting, memastikan kesejahteraan penyuluh meningkat sejalan dengan tuntutan kerja.

Banyak pihak berharap perpindahan status penyuluh ke pusat menjadi momentum kebangkitan penyuluhan Indonesia. Harapannya jelas: penyuluh menjadi lebih kuat, modern, dan efektif sebagai mitra petani. Jika penyuluhan kuat, petani kuat. Dan bila petani kuat, mimpi swasembada tinggal menunggu waktu.

"Ini kesempatan sekaligus ujian. Kalau penyuluh mampu menjawab, sistem penyuluhan kita akan semakin kokoh. Pada akhirnya, itu akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan," kata Momon. **Tim Sinta**



Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti:

Regulasi Penyelenggaraan Penyuluhan Disesuaikan



Seperti kita ketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres No. 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan. Melalui kebijakan ini, seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang sebelumnya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah akan ditarik langsung ke Kementerian Pertanian.

Penarikan penyuluh pertanian dari daerah ke pusat akan dimulai tahun 2026. Secara regulasi, sudah final, tapi dalam pelaksanaan banyak hal yang perlu diantisipasi dan pemerintah siapkan. Bukan hanya soal ketenagakerjaan yang mana posisi penyuluh pertanian kini menjadi ASN pusat, tapi juga soal penyelenggaraan penyuluhan, kemudian kelembagaan penyuluh di daerah dan berbagai hal yang perlu pemerintah antisipasi.

Berikut wawancara Tabloid Sinar Tani dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti.

Sejauh mana persiapan pemerintah menyambut 'tamu' penyuluh pertanian daerah kembali ke pusat?

Pemerintah telah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, terutama Rancangan Perpres mengenai Pembagian Kewenangan Konkuren. Selain itu, persiapan administrasi seperti menyiapkan data penyuluh pertanian yang akan di alihkan, SK, Gaji, Tunjangan Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai/SKP, Absensi dan lain sebagainya. Pemerintah juga telah melakukan berbagai persiapan pada aspek regulasi, ketenagaan dan kelembagaan.

Menyikapi kondisi tersebut, beberapa regulasi terkait penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan penyesuaian. Termasuk, mempersiapkan rancangan Peraturan Presiden urusan konkurensi tambahan sub urusan penyuluhan pertanian yang akan menjadi payung hukum bagi pemerintah pusat dan daerah.

Untuk selanjutnya Kementan juga sedang menyiapkan penyelesaian administrasi kepegawaian seperti data kepegawaian, gaji dan tunjangan kinerja, metode absensi penilaian kinerja. Selain itu, pemerintah melakukan sosialisasi terus menerus tentang pengalihan penyuluh dan hal-hal untuk penyesuaian pelaksanaannya.

Kini penyuluh menjadi ASN pusat, dimana 'rumah' atau kelembagaan mereka yang berada di daerah?

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian berada di bawah koordinasi langsung BPPSDMP, Kementerian Pertanian, dengan tetap melibatkan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota, sedangkan ditingkat Kecamatan Penyuluh Pertanian tetap bertugas di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai rumahnya Penyuluh Pertanian.

Penyuluh Pertanian sebagai ASN pusat, tetap melayani petani (Poktan/Gapoktan) tanpa berpindah tempat, hanya berubah dalam struktur administratif dan sistem pembinaan langsung dari pusat.

Di masa transisi "rumah"bagi penyuluh ASN pusat akan diatur sebagai berikut. Penyuluh Pertanian Provinsi akan ditempatkan di UPT Badan PPSDMP atau di BMRP. Jika tidak terdapat kedua UPT Kementan tersebut, maka akan dicarikan tempat yang representatif untuk digunakan sebagai "rumah" penyuluh provinsi. Sedangkan, Penyuluh Kabupaten/Kota akan ditempatkan di BPP yang terdekat dengan ibukota kabupaten/kota. Sementara, Penyuluh Pertanian Kecamatan akan ditempatkan di BPP Kecamatan.

Dalam penyelenggaraan penyuluhan, bagaimana pemerintah pusat nantinya mengaturnya, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah?

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian nantinya akan ada Peraturan Presiden terkait urusan konkuren tambahan bidang pertanian yang akan mengatur kewenangan penyelenggaraan penyuluhan pertanian untuk pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan untuk koordinasi akan ada peraturan yang mengatur tata hubungan kerja kelembagaan penyuluhan dan tata hubungan kerja penyuluh pertanian.

Pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Pertanian, terutama BPPSDMP menyelenggarakan penyuluhan pertanian secara nasional dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan dan desa/kelurahan). Pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam pelaksanaan dan dukungan operasional penyuluhan pertanian.

Nantinya, BPP menjadi pusat koordinasi teknis. Sementara forum koordinasi pusat dan daerah akan menjaga sinkronisasi kebijakan pembangunan pertanian agar tercipta dalam satu sistem penyuluhan pertanian nasional yang terintegrasi, profesional, dan merata hingga tingkat desa/kelurahan.

Kondisi penyuluh masing-masing daerah berbeda, bagaimana pemerintah menyeragamkan kompetensi mereka?

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenpanRB) Nomor SKJ.13 Tahun 2024 telah mengatur secara spesifik Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. Ada beberapa kompetensi dan tugas yang harus dipenuhi untuk setiap jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian.

Pertama, menetapkan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian, mulai dari jenjang keterampilan (Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia) hingga jenjang keahlian (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama). *Kedua,* mengatur tugas-tugas pokok penyuluh pertanian, yang mencakup pelaksanaan penyuluhan, evaluasi, dan pengembangan metode penyuluhan pertanian.

Apakah sudah ada rencana pelatihan bagi penyuluh daerah yang kini menjadi ASN pusat?

Pelatihan bagi penyuluh pertanian telah disiapkan dan disusun sesuai dengan program prioritas pembangunan pertanian. Dari mulai pelatihan teknis dan manajemen penyuluhan pertanian untuk mendukung swasembada pangan yang dilaksanakan melalui offline maupun online. **Yul**



Tonggak Baru Perkuat Peran Penyuluh Pertanian

Pemerintah melakukan langkah besar dalam sistem penyuluhan pertanian nasional. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025, Presiden mengamanatkan kepada Menteri Pertanian untuk menarik dan mengalihkan status para penyuluh pertanian dari daerah ke pusat. Kebijakan ini menjadi tonggak baru dalam upaya memperkuat peran penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan pertanian.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, I Gusti Made Ngurah Kuswandana, M.M., menjelaskan bahwa langkah ini diambil karena pemerintah menilai perlu adanya peningkatan kompetensi, kapasitas, serta efektivitas penyuluh di lapangan. Selama ini, sebagian penyuluh di daerah lebih banyak menjalankan fungsi administratif sehingga tidak optimal dalam memberikan pendampingan langsung kepada petani.

"Presiden dan Menteri Pertanian melihat perlunya peningkatan kompetensi dan efektivitas penyuluh di daerah. Selama ini ada penyuluh yang tidak fokus di lapangan. Karena itu, perlu satu komando dari pusat agar program pertanian dari atas sampai bawah bisa berjalan seirama," ujar Made.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, jumlah penyuluh pertanian di seluruh Indonesia mencapai 39.443 orang. Proses pengalihan status dilakukan secara bertahap dalam tiga gelombang. Pada batch pertama, dari 34.617 penyuluh yang terdata, sebanyak 30.331 orang memenuhi kriteria dan telah dialihkan. Batch kedua mencakup 4.358 penyuluh, sementara sisanya akan diproses pada batch ketiga.

Pemerintah menargetkan seluruh proses pengalihan selesai pada 21 Desember 2025 sehingga mulai 1 Januari 2026, seluruh penyuluh sudah resmi berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pertanian.

Rumah Penyuluh di Daerah

Meski status kepegawaian berpindah ke pusat, para penyuluh tidak akan dipindahkan dari lokasi kerja mereka saat ini. Made menegaskan, penyuluh tetap akan bekerja di wilayahnya masing-masing, hanya saja struktur komando kini berada langsung di bawah Menteri Pertanian.

"Rumah para penyuluh tetap di daerah. Bedanya, sekarang mereka berada dalam satu komando di bawah Kementerian Pertanian. Dulu banyak jalur komando sehingga program sering tidak sejalan," jelasnya.

Untuk memperlancar transisi, Kementan akan menempatkan penyuluh di unit kerja terdekat seperti UPT BPSDM, Balai Rakyat Mekanisasi Pertanian (BRMP), atau dinas pertanian provinsi bagi daerah yang belum memiliki BRMP.

Nantinya, setiap provinsi akan memiliki koordinator atau Kapoksi dan Katinker yang bertugas mengoordinasikan para penyuluh di wilayah tersebut. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kecamatan, koordinasi dilakukan melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang saat ini berjumlah sekitar 5.400 unit di seluruh Indonesia.

Made menekankan bahwa pemerintah juga tengah menyiapkan sistem tata hubungan kerja baru yang mengatur koordinasi dari pusat hingga ke tingkat kecamatan. Jalur komando dan koordinasi akan diperjelas agar penyuluh tidak mengalami kebingungan dalam menjalankan tugas.

"Tata hubungan kerja ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, hanya lebih tegas agar penyuluh memahami garis komando dan koordinasi, termasuk dengan pemangku kepentingan lain," ujarnya.

Tingkatkan Kompetensi

Selain restrukturisasi kelembagaan, Kementan juga menyiapkan langkah besar untuk meningkatkan kompetensi penyuluh melalui pembentukan Pusat Peningkatan Kompetensi Pertanian (Pusbintan). Lembaga ini akan menjadi pusat pelatihan, uji kompetensi, dan peningkatan kemampuan penyuluh di berbagai bidang.

Melalui Pusbintan, penyuluh akan mendapatkan pelatihan berkelanjutan seperti mekanisasi pertanian, digitalisasi, serta literasi keuangan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi pertanian modern.

"Kita ingin semua penyuluh memiliki kemampuan yang seragam di seluruh Indonesia dan mampu beradaptasi dengan transformasi teknologi pertanian," ujar Made. Ia menambahkan, pemerintah menyiapkan berbagai program pelatihan dan bimbingan teknis agar penyuluh dapat menjalankan perannya secara optimal di lapangan.

Menurutnya, perubahan sistem penyuluhan ini sejalan dengan visi Menteri Pertanian untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Untuk mencapai visi tersebut, dibutuhkan penyuluh yang kuat, kompeten, dan berkomitmen mendampingi petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

"Penyuluh adalah garda terdepan transformasi pertanian. Dari pusat hingga daerah, semua harus satu visi, satu semangat, dan satu komitmen untuk memajukan pertanian Indonesia," tegasnya.

Made mengingatkan, para penyuluh tidak perlu khawatir terhadap perubahan ini. Pemerintah pusat dan daerah tetap akan berkoordinasi untuk menjamin kenyamanan para penyuluh dalam bekerja. "Penyuluh harus terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha agar pertanian kita semakin maju," tambahnya.

Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi penyuluh pertanian Indonesia. Dengan penarikan penyuluh dari daerah ke pusat, diharapkan semua pihak dapat bekerja lebih solid untuk mendukung program swasembada pangan nasional. "Kita semua, dari pusat sampai daerah, sudah memiliki visi yang sama. Saatnya penyuluh bersatu, meneguhkan tekad dan semangat untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia," katanya. **Herman/Yul**

Momon Rusmono
Peluang dan Tantangan
Penyuluh Pertanian



Penarikan penyuluh pertanian daerah ke pusat menjadi kebijakan yang bersifat mandatori. Artinya, ke depan, formasi jabatan fungsional penyuluh pertanian hanya berada di Kementerian Pertanian, bukan lagi di daerah. Namun, perubahan struktur ini juga membawa implikasi panjang pada sistem penyuluhan.

Diantaranya penyusunan ulang strategi dan kebijakan penyuluhan nasional, pembenahan kelembagaan penyuluhan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, penumbuhan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani, serta perbaikan sarana dan pembiayaan penyuluhan.

"Intinya, ini bukan hanya memindahkan orang, tapi merombak sistem," kata mantan Sekjen Kementerian Pertanian yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Momon Rusmono.

Anggota Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional ini juga melihat, kebijakan ini tentu membawa harapan baru. Ada lima peluang utama bagi penyuluh. Pertama, peluang karier lebih terbuka. Dengan status pusat, jenjang karier, fasilitas kerja, dan kompensasi dinilai lebih menjanjikan.

Kedua, peluang pengembangan profesional semakin luas, termasuk pelatihan, pendidikan lanjutan, seminar nasional hingga internasional di bidang teknis, manajerial, maupun sosial-kultural. Ketiga, jaringan kerja penyuluh akan melebar. "Mereka dapat berinteraksi dengan kementerian/lembaga pusat, lembaga riset, hingga organisasi internasional, sekaligus tetap menjalin koordinasi horizontal dengan pemerintah daerah dari provinsi hingga desa," katanya.

Keempat, penyuluh dapat berkontribusi langsung dalam penyusunan kebijakan strategis nasional. Ini menjadi sesuatu yang sebelumnya lebih banyak terjadi di level pusat tanpa sentuhan pandangan lapang. Kelima, penyuluh berpeluang lebih besar menjadi penggerak utama program prioritas Kementan. "Ini kesempatan emas. Penyuluh bisa lebih berperan dalam menentukan arah kebijakan, bukan hanya melaksanakan," kata Momon.

Namun, peluang selalu datang berpasangan dengan tantangan. Setidaknya ada lima tantangan yang perlu dicermati penyuluh agar tak kaget dengan sistem baru. Pertama, adaptasi organisasi. Lingkungan kerja di pusat relatif lebih kompleks, berlapis, dan cepat bergerak. Kedua, target kinerja pasti lebih tinggi dengan tenggat lebih singkat, sementara output harus lebih jelas dan terukur.

Ketiga, kompetisi akan semakin ketat. Penyuluh harus meningkatkan kapasitas diri agar bisa bersaing secara sehat. Kolaborasi pun menjadi keharusan, bukan pilihan. Keempat, kemampuan komunikasi dan koordinasi lintas pihak harus semakin matang karena penyuluh akan jadi jembatan kebijakan pusat dengan pelaksanaan di daerah.

Kelima, tantangan paling penting adalah kemampuan menerjemahkan kebijakan ke bahasa lapangan. "Jangan sampai penyuluh hanya jadi perpanjangan tangan pusat. Mereka harus mampu menjahit kebijakan agar pas dengan kondisi petani dan wilayah," ujar Momon mengingatkan.

Bila transisi berjalan mulus, sistem penyuluhan nasional akan menjadi lebih solid dan kuat. Penyuluh yang selama ini bekerja terpisah-pisah di bawah pemerintah daerah akan berada dalam satu komando. Koordinasi program bisa lebih terkonsolidasi, evaluasi kinerja lebih terukur, dan penguatan kapasitas bisa dilakukan seragam.

Di sisi lain, daerah tetap menjadi mitra penting. Peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi kelembagaan petani, penyediaan sarana penyuluhan, hingga sinkronisasi program daerah tetap diperlukan. "Satu komando bukan berarti sentralistik. Justru harus ada sinergi kuat antara pusat dan daerah," kata Momon. **Gsh/Yul**

Prof. Dedi Nursyamsi
Mandat Besar
Penyuluh Pertanian

Pemerintah bergerak cepat menyatukan komando pembangunan pertanian nasional. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan, seluruh penyuluh pertanian yang sebelumnya berada di bawah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mulai dialihkan ke Kementerian Pertanian. Kebijakan ini diyakini menjadi penentu keberhasilan peningkatan produksi pangan dalam waktu singkat.

Mantan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Prof Dedi Nursyamsi, menegaskan bahwa alih kelola penyuluh ke pusat bukan sekadar perubahan struktur birokrasi. Langkah ini dirancang agar tenaga penyuluh berada dalam satu garis komando langsung, sehingga pelaksanaan program peningkatan produksi bisa berjalan seragam dan terukur di seluruh daerah.

Dengan penyatuan kelembagaan ini, penyuluh tidak lagi terpecah di bawah kewenangan daerah. Mereka akan bergerak di bawah sistem nasional yang terintegrasi dengan program, target, dan kurikulum penyuluhan yang sama dari Sabang sampai Merauke. "Konsolidasi penyuluh sebagai "syarat mutlak" agar percepatan swasembada pangan dapat terwujud, karena penyuluh adalah garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan petani," katanya.



Setelah dialihkan ke pusat, Dedi mengingatkan, penyuluh memiliki mandat lebih besar dalam mendukung program peningkatan produksi. Fokus utama tahun ini adalah komoditas beras dan jagung, dua pilar utama swasembada pangan nasional. "Penyuluh wajib mendukung dan mengawal program Kementerian Pertanian, terutama yang bertujuan meningkatkan produksi untuk mencapai swasembada," tegasnya.

Di sinilah peran penyuluh kembali penting untuk membantu petani memperoleh akses pupuk, bantuan benih, alat produksi, hingga memperjuangkan harga gabah yang menguntungkan.

Dengan terkonsolidasinya penyuluh ke bawah Kementerian Pertanian, pemerintah berharap sistem penyuluhan akan lebih solid, seragam, dan responsif terhadap tantangan sektor pangan. Perubahan iklim, alih fungsi lahan, ketergantungan dunia terhadap impor pangan, hingga gejolak harga global menjadi tantangan yang hanya bisa dihadapi dengan sistem penyuluhan yang kuat.

"Pengalihan penyuluh ini bukan administratif semata. Ini konsolidasi kekuatan nasional," tegasnya. Dedi meyakini, jika produksi terus diperkuat, kesejahteraan petani dijaga, dan penyuluh berada dalam satu komando, maka target swasembada bukan hanya tercapai, tetapi dapat dipertahankan dalam jangka panjang. **Gsh/Yul**

Jadi Pegawai Pusat,
Ujian Profesionalisme Penyuluh

Peran penyuluh pertanian kini semakin strategis di tengah upaya mewujudkan pertanian modern dan berkelanjutan. Namun, perubahan besar sedang menanti. Para penyuluh di seluruh Indonesia, tengah bersiap menghadapi transisi status menjadi pegawai pusat.

Perubahan ini disambut dengan optimisme, namun juga diiringi sejumlah tantangan yang tak ringan. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Jawa Tengah, Warsana, SP., M.Si., MP., menegaskan bahwa transformasi ini bukan sekadar urusan administratif.

"Ini bukan sekadar perubahan status. Ini adalah ujian profesionalisme bagi seluruh penyuluh untuk membuktikan diri sebagai agen pembangunan yang tangguh, inovatif, dan berintegritas," ujar Warsana yang juga Penyuluh Pertanian Ahli Utama BRMP Jawa Tengah.

Dalam pandangan Warsana, penyuluh pertanian adalah ujung tombak pembangunan sektor pertanian. Mereka menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan dan kondisi petani di lapangan.

Di era modernisasi dan digitalisasi pertanian, penyuluh tidak lagi cukup hanya turun ke sawah atau ladang, melainkan juga harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat transfer pengetahuan dan inovasi.

"Penyuluh sekarang harus melek digital. Mereka perlu menguasai *e-extension*, aplikasi SIMLUHTAN, dan teknologi *smart farming* agar dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat bagi petani," jelasnya.

Selain menjadi pendamping teknis, penyuluh juga berperan sebagai motivator dan fasilitator agar petani mampu mengelola usaha tani secara mandiri dan berorientasi pasar. "Penyuluh harus menjadi motor penggerak petani menuju kemandirian dan kesejahteraan," tambahnya.

Konsekuensi Besar

Transformasi menjadi pegawai pusat membawa konsekuensi besar, baik dalam hal sistem kerja, manajemen, maupun kultur organisasi. Warsana menyebut, ada tiga tantangan utama yang harus diantisipasi.

Pertama, penyesuaian terhadap sistem administrasi dan manajemen berbasis kinerja nasional. Penyuluh dituntut untuk bekerja dengan ukuran capaian yang lebih jelas dan terukur. Kedua, adaptasi terhadap struktur organisasi yang lebih vertikal di bawah kementerian. Hal ini menuntut kemampuan komunikasi lintas wilayah dan lintas jenjang birokrasi. Ketiga, kesiapan mental dan profesionalitas aparatur.

"Perubahan status menuntut kesiapan mental. Kita harus tetap menjaga kedekatan dengan petani di lapangan, meski nanti bekerja di bawah sistem pusat. Loyalitas kepada institusi pusat harus sejalan dengan loyalitas kepada petani," tutur Warsana.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penyuluh pertanian perlu menyiapkan diri secara komprehensif. Menurut Warsana, ada empat kesiapan utama yang harus dimiliki. Pertama, kesiapan kompetensi teknis, yaitu penguasaan teknologi pertanian terkini, analisis data, serta kemampuan menggunakan media digital untuk penyuluhan.

Kedua, kesiapan manajerial, mencakup perencanaan, pelaporan, dan evaluasi berbasis kinerja pusat. Ketiga, kesiapan kepribadian dan etos kerja, yakni integritas, disiplin, serta semangat pelayanan publik. Keempat, kesiapan adaptif terhadap perubahan organisasi, meliputi kemampuan berkolaborasi dan berinovasi lintas bidang. "Era baru ini menuntut penyuluh yang tidak hanya cakap secara teknis, tapi juga tangguh, adaptif, dan terbuka terhadap perubahan," katanya.

Dukungan kelembagaan dan kebijakan

Warsana menilai, keberhasilan penyuluh dalam menjalankan peran barunya sebagai pegawai pusat sangat bergantung pada dukungan kelembagaan dan kebijakan pemerintah. Ia menekankan perlunya pelatihan teknis berkelanjutan, sistem pembinaan karier berbasis kompetensi, dan fasilitas digital yang memadai.

"Pemerintah perlu hadir melalui pelatihan yang berkesinambungan dan fasilitas kerja yang memadai. Jangan sampai penyuluh dituntut berinovasi, tapi sarana pendukung-nya belum siap," ujar Warsana menegaskan.

Lebih jauh, Warsana menilai bahwa profesionalisme menjadi syarat mutlak bagi penyuluh pertanian di era baru. Profesionalisme bukan hanya soal administrasi, tetapi sejauh mana penyuluh mampu memberikan dampak nyata bagi petani. "Profesionalisme penyuluh diukur dari kontribusinya terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Penyuluh harus hadir dengan solusi, bukan sekadar laporan," ujarnya.

Ada tiga aspek utama dalam profesionalisme penyuluh, lanjutnya. Pertama, kompetensi teknis dalam menerapkan teknologi dan inovasi pertanian. Kedua, integritas dan etika kerja, termasuk kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Ketiga, komitmen terhadap pembangunan petani, yaitu



menjadikan keberhasilan petani sebagai keberhasilan bersama.

Selama ini, kontribusi penyuluh pertanian terbukti nyata dalam berbagai aspek pembangunan. Mereka membantu meningkatkan produktivitas melalui demplot, pendampingan teknis, dan penerapan teknologi tepat guna.

Penyuluh juga berperan dalam pembentukan kelembagaan petani seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta koperasi pertanian yang lebih kuat dan mandiri. Selain itu, penyuluh menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai program nasional seperti LTT, *food estate*, hingga digital farming. Tak kalah penting, mereka juga aktif dalam mendorong lahirnya petani milenial melalui pelatihan kewirausahaan dan inovasi berbasis teknologi.

"Penyuluh profesional bukan yang paling pintar di kantor, tetapi yang paling hadir di tengah masyarakat. Mereka bekerja dengan hati, berpikir dengan ilmu, dan bertindak dengan semangat pengabdian," tutup Warsana dengan penuh keyakinan.

Herman/Yul



Ayam Merah Putih
Angkat Kesejahteraan Peternak

Pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional, khususnya melalui peningkatan ketersediaan protein hewani yang bermutu, terjangkau, dan berkelanjutan. Salah satu program yang saat ini menjadi perhatian adalah Program Pengembangan Ayam Petelur "Ayam Merah Putih".





Subsektor peternakan memegang posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Telur, daging dan berbagai produk hewani merupakan sumber protein penting untuk pertumbuhan dan kesehatan manusia. Selain itu, subsektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi tulang punggung ekonomi banyak keluarga di daerah.

Karena itu, memperkuat sektor peternakan berarti memperkuat pondasi kesejahteraan nasional. "Penguatan subsektor peternakan merupakan langkah untuk memastikan ketersediaan protein hewani masyarakat dan meningkatkan pendapatan peternak. Ini adalah investasi jangka panjang bagi ketahanan pangan bangsa," ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, dalam kegiatan Evaluasi Program Ayam Petelur di Jakarta beberapa waktu lalu.

Agung menjelaskan, Program Ayam Merah Putih menjadi salah satu upaya Kementerian Pertanian memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat. "Melalui bantuan ayam petelur dan pembinaan teknis yang berkelanjutan, Kementan ingin mendorong tumbuhnya usaha peternakan skala keluarga dan kelompok di pedesaan agar lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing," ujarnya.

Program ini dijalankan berdasarkan Petunjuk Teknis Pengembangan Ayam Petelur Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan bersama Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian serta pemerintah daerah. Tujuannya tidak hanya menyediakan pasokan telur dalam negeri, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui usaha peternakan rakyat yang lebih produktif dan mandiri.

Agung menegaskan, pihaknya berkomitmen memperluas jangkauan program ini dan memastikan seluruh bantuan yang disalurkan tepat sasaran, efektif, serta berkelanjutan bagi penerima manfaat di berbagai daerah. "Kami berharap Program Ayam Merah Putih mampu meningkatkan produksi telur di tingkat lokal, menstabilkan harga, serta memperkuat ekonomi masyarakat desa sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan hewani nasional," katanya.

Karena itu dirinya mengapresiasi seluruh satuan kerja yang telah berperan aktif melaksanakan pengembangan ayam petelur tahun 2025. Seluruh kelompok penerima bantuan harus menjalankan pemeliharaan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan bantuan dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.

Selain meningkatkan kemandirian pangan, program ini diharapkan dapat mendukung kesiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan pasokan telur dalam jumlah besar. Karena itu, kelompok peternak didorong untuk menjalin kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta memperkuat akses pemasaran melalui dinas dan koperasi daerah.

Agung berharap Program Ayam Merah Putih dapat terus diperluas dan dijalankan secara berkelanjutan. "Kami ingin memastikan program ini bukan hanya bantuan sesaat, tetapi menjadi pendorong lahirnya usaha peternakan yang produktif, mandiri, dan berdaya saing di desa-desa seluruh Indonesia," pungkasnya.

Manfaat bagi Peternak

Program Ayam Merah Putih telah memberikan manfaat nyata. Salah satunya dirasakan dua kelompok di Kabupaten Bandung yakni Kelompok Tani Motekar di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, dan Kelompok Peternak Gertapang di Desa Mekarsari, Kecamatan Cipongkor.

Ketua Kelompok Tani Motekar, Anjang Suhendar mengatakan, kelompoknya menerima bantuan 600 ekor ayam petelur lengkap dengan kandang, pakan, vitamin, dan sarana pendukung. Kini ayam-ayam tersebut telah berproduksi, sehingga pendapatan anggota kelompok ikut meningkat.

"Alhamdulillah hasil produksinya sudah kami rasakan. Bantuan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan protein masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan anggota. Kami berkomitmen mengembangkan usaha ini secara mandiri," ujarnya.

Ketua Kelompok Peternak Gertapang, Panji Nugraha mengungkapkan, sebelum menerima bantuan, kelompoknya sempat menghadapi tingginya biaya pakan yang menjadi beban utama dalam usaha peternakan. Setelah mendapatkan dukungan pakan dan pendampingan teknis, kondisi usaha menjadi lebih stabil dan produksi meningkat signifikan. "Produksi telur meningkat, ayam sehat, dan pendapatan anggota naik. Program ini membuat usaha kami lebih berkelanjutan," katanya.

Kedua kelompok berharap program ini terus diperluas ke wilayah lainnya karena dampaknya tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga pada tumbuhnya semangat gotong royong dan pemberdayaan masyarakat desa.

Program Ayam Merah Putih kini juga telah tiba di Papua Barat Daya. Kehadirannya membuka peluang usaha baru bagi masyarakat lokal dan mendorong peningkatan ekonomi daerah. Anggota Komisi IV DPR RI Robert Joppy Kardinal menyampaikan optimisme terhadap keberlanjutan program.

"Semoga ini menjadi manfaat nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat Papua Barat Daya. Dengan pendampingan yang tepat, masyarakat dapat belajar beternak dengan baik dan mengembangkan usaha secara mandiri," ujarnya.

Humas Ditjen PKH



Tim Koordinasi MBG **Perkuat Posisi BGN**



Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025. Pembentukan tim lintas kementerian dan lembaga ini menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan program unggulan Presiden berjalan efektif, terkoordinasi, dan tepat sasaran di seluruh Indonesia.

Keppres yang ditandatangani pada 24 Oktober 2025 tersebut menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda strategis pemerintahan Prabowo-Gibran untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa dan memperkuat ketahanan sumber daya manusia Indonesia.

Tim koordinasi ini memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap tahap pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, mulai dari penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan di pusat dan daerah, hingga evaluasi terhadap dampaknya bagi masyarakat.

Tim Koordinasi MBG diketuai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang akan didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, (Wakil Ketua I), dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua II).

Jabatan sekretaris dipercayakan kepada Kasan, yang saat ini menjabat Sekretaris Kemenko Pangan. Adapun Nanik S. Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi MBG.

Dalam susunan yang diatur melalui Pasal 6 Keppres tersebut, tercatat sejumlah tokoh penting dari berbagai kementerian dan lembaga negara menjadi anggota tim. Diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Terdapat juga nama Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy; Menteri PAN-RB, Rini Widyantini; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Menteri Agama, Nasaruddin Umar; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti; Kepala BKKBN, Wihaji; Menteri Koperasi, Ferry Juliantono; Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh; Kepala Staf Kepresidenan, M. Qodari, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo.

Melalui Keppres ini, Presiden menugaskan tim koordinasi untuk melaksanakan fungsi strategis dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Tugas utama mereka adalah melakukan sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program dapat berjalan seragam di seluruh daerah.

Selain itu, tim juga bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program, menyelesaikan berbagai kendala di lapangan, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Dalam Pasal 4 Keppres No. 28 Tahun 2025 menjelaskan bahwa tim ini juga berfungsi untuk menyusun kebijakan pelaksanaan MBG, memastikan integrasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah, serta melakukan pengendalian agar pelaksanaan program tetap pada jalur yang ditetapkan. Keberadaan tim lintas sektor ini diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih kebijakan, mempercepat proses distribusi bantuan makanan bergizi, serta meningkatkan efektivitas anggaran yang digunakan.

Perkuat BGN

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, keberadaan Tim Koordinasi MBG tidak menggantikan peran Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama program. Menurutnya, tim koordinasi ini berfungsi memperkuat kerja sama antarinstansi pemerintah dan membantu BGN dalam pengawasan, koordinasi, dan penyusunan kebijakan lintas sektor.

"Untuk membantu Badan Gizi Nasional dan pemerintah, Bapak Presiden membentuk yang namanya tim koordinasi. Kalau pertanyaannya tentang ketua harian, itu hanya ketua harian untuk di tim koordinasinya saja, bukan di BGN-nya," kata Prasetyo di Jakarta.

Ia menegaskan, pelaksana utama program MBG tetap berada di bawah tanggung jawab Kepala BGN, Dadan Hindayana. "Yang memegang program ini tetap Kepala BGN-nya," ujarnya.

Prasetyo yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Presiden menambahkan, pembentukan tim ini justru memperkuat sinergi antarinstansi dan memastikan seluruh kementerian serta lembaga terkait bergerak dalam arah yang sama demi keberhasilan program gizi nasional tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada peningkatan gizi anak-anak, terutama di jenjang pendidikan dasar. Program ini diharapkan mampu menurunkan angka stunting, meningkatkan daya tahan tubuh anak, serta menciptakan generasi muda yang lebih sehat dan cerdas.

"Melalui program ini, pemerintah berupaya memberikan akses makanan bergizi secara merata kepada pelajar di seluruh Indonesia, termasuk di daerah tertinggal dan terpencil," katanya. Dengan adanya Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berharap pelaksanaan program tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Karena itu menurut Prasetyo, kolaborasi antar kementerian dan lembaga diharapkan dapat mempercepat penyelesaian hambatan administratif maupun teknis di lapangan. Selain itu, tim juga diharapkan mampu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaan program, mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga evaluasi hasil.

"Dengan koordinasi yang solid, pemerintah optimistis program ini akan menjadi tonggak penting dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing di masa depan," tuturnya.

Melalui langkah strategis ini, Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Pembentukan Tim Koordinasi MBG bukan hanya bentuk perhatian terhadap perbaikan gizi anak bangsa, tetapi juga bukti bahwa pemerintah berupaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui kebijakan yang konkret dan terukur.

Humas BGN

Penyuluh: Potongan Puzzle Menuju Swasembada

Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian menjadi angin segar bagi seluruh insan pertanian. Mulai dari petani, pelaku usaha, hingga pemangku kepentingan di sektor pangan menyambutnya dengan penuh optimisme. Bagi para penyuluh, kebijakan ini bukan sekadar regulasi, melainkan potongan *puzzle* yang selama ini hilang dari kunci swasembada pangan nasional.

Seperti yang kerap digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Indonesia harus mampu mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun. Sebuah cita-cita besar yang diterjemahkan dengan solid oleh duet Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian. Dua figur ini ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi: sang Menteri bertipe visioner, sedangkan sang Wakil dikenal sebagai eksekutor lapangan yang tangguh.

Satu tahun kinerja Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan mereka mulai menampakkan hasil nyata. Stok beras nasional kini mencapai 4,2 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah Republik. Indonesia bahkan menempati peringkat kedua dunia dalam produksi beras, tepat di bawah Brasil. Serapan gabah dan beras oleh Bulog berjalan lancar, harga gabah kian berpihak kepada petani, dan kesejahteraan petani terus meningkat dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 124,36.

Langkah menuju swasembada pangan semakin kokoh, didukung oleh teknologi, kebijakan yang tepat sasaran, serta semangat petani hebat di seluruh penjuru negeri. Pemerintah juga berhasil menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen, tanpa menambah beban subsidi dari APBN. Sementara itu, tenaga kerja pertanian tahun 2025 naik menjadi 38,99 juta orang, meningkat 1,80 persen dibanding tahun sebelumnya. Tidak kalah membanggakan, nilai ekspor produk pertanian hingga Agustus 2025 menembus Rp507,78 triliun, atau tumbuh 42,19 persen dibandingkan 2024.

Namun di tengah capaian gemilang ini, pekerjaan rumah masih menanti. Anomali iklim dan praktik mafia pangan menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan kolaborasi lintas sektor. Kementerian Pertanian bersama mitra strategis seperti Polri, TNI, dan PERHIPTANI harus terus bergandengan tangan memastikan semangat swasembada tidak hanya bertahan di 2025, tetapi juga berlanjut di tahun-tahun mendatang.



Oleh: **Iskandar Pasha, S.P.**
Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia
Kab Merangin Jambi

Capaian produksi nasional yang menembus 34,77 juta ton pada awal November ini menjadi bukti nyata bahwa arah kebijakan sudah berada di jalur yang tepat. Tahun 2026 akan menjadi momentum penting: ketika Penyuluh Pertanian resmi berada dalam satu komando di bawah Kementerian Pertanian. Saat itulah, seluruh kekuatan lapangan akan bersatu dalam satu irama kerja.

Kini saatnya kita semua "on fire"—bergerak serentak, bahu membahu mewujudkan mimpi besar bangsa: swasembada pangan yang berdaulat dan berkelanjutan.

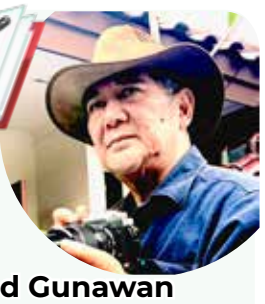
Ibarat sepiring gado-gado, penyuluh adalah kacang yang menyatukan seluruh unsur: petani, teknologi, kebijakan, dan pasar. Dari tangan mereka, semangat gotong royong tumbuh, pengetahuan menyebar, dan kemandirian pangan menemukan wujudnya.

Maka tidak berlebihan jika kita tegaskan: "Apa pun programnya, penyuluhan adalah kuncinya."



Penyuluh **Balik ke Pusat**

Kolom



Oleh: **Memed Gunawan**

Penyuluh Pertanian ditarik kembali ke pusat, dalam upaya meningkatkan kualitas penyuluhan, agar sejalan dengan rencana strategis nasional seperti swasembada pangan, pertanian berkelanjutan dan hilirisasi, didukung pendanaan, pengawasan/evaluasi serta teknologi dan data nasional.

Prosesnya tidak sederhana karena harus menata kembali kelembagaan di pusat dan daerah, anggaran dan penggajian, urusan kepegawaian, penetapan tugas, pelatihan dan pendidikan penyuluh, koordinasi daerah-pusat, dan banyak lagi.

Inpres Nomor 3 Tahun 2025 mengamanatkan pemindahan penyuluh ke pemerintah pusat, dengan deadline pelaksanaan teknis awal tahun 2026. Pusat Penyuluhan Pertanian Nasional berada di Kementan, bertanggung-jawab dalam menetapkan fungsi, kebijakan, formasi ASN, standar penyuluhan, modul pelatihan, sistem informasi, monitoring dan evaluasi, sedangkan unit di provinsi/kabupaten sebagai mitra pelaksana lapangan.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tetap sebagai tempat kerja fisik namun secara administratif penyuluh berstatus ASN pusat. SK teknis diperlukan untuk menjelaskan peran BPP pasca-pemindahan. Diperlukan penetapan profil jabatan (job profile) untuk penyuluh mengenai kompetensi teknis, soft skill, tugas administratif, target kinerja, jenjang karir dan tupoksi.

Pengaturan itu antara lain tentang status ASN, mekanisme mutasi/penempatan, klausul pensiun/transisi, dan hak atas fasilitas (BPJS, tunjangan, fasilitas lapangan). Termasuk juga Sistem Informasi dan Basis Data, yang menyatukan data penyuluh (NIP, lokasi kerja BPP, kapabilitas, kinerja) dalam satu Sistem Informasi Penyuluhan Nasional.

Koordinasi pusat–daerah (protokol dan mekanisme operasional) bertujuan menjaga layanan lapangan tetap lancar sekaligus menerapkan pengawasan/dukungan pusat. Di sinilah perlunya MoU, Kementan-Gubernur/Bupati/Wali Kota yang memuat kewajiban daerah (fasilitas kantor, dukungan logistik, data kebutuhan), dan kewajiban pusat (penggajian, pelatihan, payung hukum), dan mekanisme penyelesaian masalah.

SOP operasional harus disiapkan tentang penggunaan BPP, pelaporan mingguan/bulanan, permintaan anggaran operasional lokal, dan koordinasi kegiatan darurat.

Mekanisme komunikasi menjadi sangat penting, Saluran koordinasi rutin, rapat koordinasi triwulan (pusat-provinsi-kabupaten), dashboard kinerja online, kontak teknis/regional center di Kementan, pejabat penghubung di Dinas Pertanian sebagai koordinator yang memasilitasi kebutuhan lapangan (tanah, lahan demo, logistik). Mekanisme audit dan supervisi, tim audit/monitoring gabungan (Kementan dan perwakilan daerah) untuk mutu penyuluhan.

Gaji penyuluh, tunjangan dan mekanisme keuangan, sinkronisasi data riwayat gaji dari daerah ke BKN/Kementan, kepesertaan BPJS (Kesehatan & Ketenagakerjaan) harus diteruskan tanpa gap. Aliran pembayaran gaji dan biaya operasional mekanisme pelaksaanaannya dilaksanakan melalui sistem yang menjamin kelancaran kegiatan penyuluh di lapangan.

Kita berharap, ditariknya kembali penyuluh pertanian ke pusat akan segera memberikan dampak positif bagi penyuluhan maupun penyuluhnya. Persiapannya memang tidak sederhana tetapi dengan dukungan dan koordinasi lembaga terkait proses ini bisa dilaksanakan dengan baik dan teliti. Pertanian selalu akan melekat dengan penelitian dan penyuluhan.

KELAPA, Saatnya Bangkit Kembali

Kelapa kini mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah. Selama ini komoditas yang pernah berjaya, kemudian sempat terpinggirkan, siap kembali berkibar. Pemerintah mendorong hilirisasi kelapa untuk mengangkat nilai tambah dan kesejahteraan petani.



Melonjaknya harga di dalam negeri beberapa waktu lalu yang berujung pada impor kelapa menjadi moment pemicu bangkitnya komoditas nyiur melambai ini. Bahkan Presiden Prabowo Subianto langsung turun tangan mendorong percepatan industrialisasi sektor pertanian dengan dukungan anggaran triliun-an rupiah. Dukungan besar ini akan diarahkan untuk memperkuat hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor produk olahan pertanian.

"Presiden Prabowo Subianto menekankan agar pertanian kita tidak hanya berhenti di hulu. Petani harus merasakan langsung nilai tambah dari produk mereka. Tidak cukup hanya tanam, tapi harus olah dan jual dalam bentuk bernilai tinggi," kata Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman saat berkunjung ke pabrik pengolahan kelapa PT NICO, Minggu (27/10).

Amran menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa melalui hilirisasi industri dan peningkatan harga beli di tingkat petani. Namun ia mengingatkan, hilirisasi tidak akan bermakna jika petani tidak menikmati nilai tambah yang adil dari hasil kebunnya.

"Sekarang harga kelapa butir di petani hanya dua sampai tiga ribu rupiah. Kita minta pelaku industri untuk menaikkan harga beli supaya petani untung. Jangan sampai nilai tambah hanya berhenti di pabrik," ujar Amran.

Nilai Ekonomi Melonjak

Bahkan, nilai ekonomi kelapa dapat melonjak hingga seribu persen bila diolah. Bayangkan, jika kelapa butir hanya Rp 3.000, maka saat diolah menjadi coconut milk atau *coconut water,* nilainya bisa Rp 40-50 ribu per butir. "Inilah pentingnya hilirisasi dan harga petani yang adil," katanya.

Saat ini menurut Amran, ekspor kelapa bernilai sekitar Rp24 triliun per tahun. Jika dihilirisasi secara maksimal, nilainya bisa melonjak hingga 50-100 kali lipat, mencapai Rp1.000 triliun atau lebih. Salah satunya, ekspor produk olahan kelapa asal Maluku Utara telah menembus pasar Tiongkok.

Amran menilai, Industri peng-olahan tidak hanya meningkatkan ekspor, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. Produk seperti coconut milk, VCO, dan arang tem-purung hasil produksi pabrik lokal seperti PT NICO menjadi bukti nyata bahwa hilirisasi bisa dilakukan dari tingkat desa.

"Yang membanggakan, ekspor ini dari Maluku Utara. Ini tonggak sejarah, kita tidak lagi kirim bahan mentah, tapi produk jadi dari daerah," ujarnya. "Kita tidak boleh hanya menjual kopra. Ke depan, kita ekspor coconut milk, coconut chips, hingga coconut flour. Ini akan meningkatkan devisa dan menekan kemiskinan di pedesaan," tambahnya.

Sebagai salah satu sentra kelapa nasional, pemerintah sudah menyiapkan program pengem-bangan 10 ribu ha lahan kelapa mulai tahun 2026, yang akan dibagi di beberapa kabupaten. Dukungan tersebut diberikan sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat hilirisasi komoditas perkebunan berbasis daerah.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Maluku Utara memiliki 158.953 ha lahan kelapa produktif dengan produksi sekitar 1,02 miliar butir per tahun. Sebanyak 76 persen dari produksi ini telah diserap oleh industri hilir di provinsi tersebut. Dengan potensi tersebut, Amran optimistis model hilirisasi di Maluku Utara dapat menjadi contoh nasional.

Bahkan pemerintah juga ber-komitmen untuk mendukung petani kelapa melalui penyediaan bibit unggul, pupuk, dan akses permodalan. Misalnya, tambahan anggaran Rp10 triliun untuk me-nyediakan bibit gratis bagi petani, termasuk di Maluku Utara.

"Hilirisasi kelapa bukan sekadar soal ekspor, tetapi juga tentang membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Dari Maluku Utara, kita buktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar global," katanya.

Basis Keunggulan Daerah

Namun, Amran menegaskan arah pembangunan pertanian nasional harus berbasis pada keunggulan komparatif wilayah, yakni potensi spesifik yang dimiliki setiap daerah agar pembangunan pertanian menjadi lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi petani.

"Kita harus dorong pertanian sesuai potensi dan keunggulan daerah masing-masing. Maluku Utara ini punya kelapa dan rempah, sesuai kultur dan budaya setempat. Kalau kita fokus pada komoditas yang unggul, hasilnya akan jauh lebih besar bagi masyarakat," jelas Amran.

Bahkan Amran melanjutkan, pembangunan pertanian ke depan tidak boleh lagi bersifat seragam di seluruh Indonesia. Setiap daerah harus fokus pada komoditas yang paling sesuai dengan karakter geografis, sosial, dan budaya lokalnya.

"Kita tidak bisa samakan semua daerah. Fokuslah pada yang unggul. Kalau kelapa, ya dorong kelapa di sini. Jangan semua mau tanam padi. Kita akselerasi pengembangan dari hulu sampai hilir agar petani menikmati nilai tambahnya," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengungkap-kan potensi Maluku Utara pada komoditas kelapa cukup besar. Saat inipun hilirisasi di Maluku Utara sudah berjalan dan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

"Hari ini ada 156 ribu hektar lahan kelapa di Maluku Utara dengan produksi kurang lebih sekitar 1 miliar butir per tahun. Bagaimana sebelumnya petani hanya menjual kopra, kemudian menjual butiran kelapa, dan dengan adanya pabrik harga per butir kelapanya meningkat menjadi Rp3.000," tutur Sherly

Selain itu, dirinya akan meng-optimalkan lahan-lahan tidur untuk penambahan buah kelapa yang ditanam dan penambahan pabrik. Dengan demikian, masyarakat mampu meningkatkan kualitas hasilnya, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan petani naik.

Sherly yakin program hilirisasi dan peningkatan harga beli kelapa akan menjadi motor ekonomi baru bagi provinsi kepulauan tersebut. "Potensi kita luar biasa, lebih dari 150 ribu hektar kelapa produktif. Dengan dukungan 10 ribu hektar tambahan dan harga beli yang lebih baik, kesejahteraan petani pasti meningkat," ujarnya. **Yul**



MUD MAX, Gesit di Sawah Berlumpur

Kementerian Pertanian terus mendorong modernisasi pertanian. Melalui, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian (BRMP Mektan) memperkenalkan combine harvester generasi baru yang mampu melibas sawah berlumpur dan efisien saat panen. Namanya, MUD MAX.

Upaya memperkuat modernisasi pertanian terus berjalan. Salah satu capaian yang menarik perhatian datang dari BRMP Mektan di Serpong. Lembaga ini yang dulu bernama Balai Besar Mekanisasi Pertanian ini memperkenalkan prototipe combine harvester terbaru yang diberi nama MUD MAX. Mesin panen padi ini lahir dari kebutuhan petani di lapangan, terutama petani yang menghadapi persoalan klasik saat musim hujan, panen tersendat karena sawah terlalu becek.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang hadir langsung menyaksikan uji performa MUD MAX tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mencoba kemampuannya. Mesin melaju mulus di lahan berlumpur tanpa kendala berarti.

Amran menegaskan transformasi pertanian dari cara tradisional menuju sistem modern bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bila Indonesia ingin menjaga swasembada pangan yang sudah diraih. Kehadiran generasi baru combine harvester menjadi simbol kemajuan mekanisasi pertanian Indonesia.

Teknologi ini memungkinkan kegiatan panen dilakukan lebih cepat, efisien, dan presisi, bahkan di lahan sawah dengan kondisi drainase buruk sekalipun. "Kehadiran combine harvester generasi baru seperti MUD MAX menjadi simbol bahwa Indonesia tidak lagi hanya sebagai pengguna, tetapi juga mampu menjadi pengembang teknologi pertanian," tuturnya.

Plt. Kepala BRMP Mektan, Agung Prabowo menjelaskan, MUD MAX lahir dari suara petani yang disampaikan melalui penyuluh pertanian. Banyak masukan yang muncul terkait kesulitan combine harvester yang ada saat musim hujan. Kemudian, tim BRMP Mektan mulai merancang mesin dengan konsep lincah di lumpur, mudah dirawat, dan tetap hemat bahan bakar.

"Sejak awal kami berkomitmen agar alat ini tidak hanya unggul di atas kertas, tetapi benar-benar bekerja di kondisi sawah Indonesia yang beragam," katanya. Meski mesin panen ini dirakit dengan daya 100 HP dan bobot sekitar 2,9 ton, menariknya memiliki tekanan tanah yang rendah, sehingga tidak mudah tenggelam saat melintas di lahan basah. Tingginya jarak mesin dari permukaan tanah membantu mesin tetap aman meski menghadapi lumpur tebal.

Bagi petani di daerah rawa, tanah sawah tadah hujan, serta wilayah yang drainasenya kurang baik, kemampuan ini menjadi angin segar. Mereka selama ini kerap menunda panen karena alat sulit masuk ke sawah, sementara menunggu tanah kering justru meningkatkan risiko kehilangan hasil.

"Setiap kekurangan kami perbaiki berdasarkan pengalaman nyata pengguna. Tujuannya sederhana, alat ini harus bisa dioperasikan oleh petani biasa, diperbaiki bengkel alsintan desa, dan disukai karena manfaatnya langsung terasa di lapangan," tuturnya.

Hasil uji coba awal menunjukkan bahwa MUD MAX mampu merampungkan panen 1 ha sawah dalam waktu sekitar 4-5 jam dengan tingkat kebersihan gabah yang tinggi. Kecepatan ini berdampak pada penurunan biaya panen serta mengurangi kehilangan hasil karena terlambat panen.

Harga Terjangkau

Saat ini pemerintah terus mengupayakan agar teknologi pertanian semakin terjangkau. Agung mencontohkan penurunan harga *combine harvester* dalam beberapa tahun terakhir yang turun drastis dari sekitar Rp600 juta menjadi sekitar Rp300 juta per unit.

Harga rice transplanter pun ikut melandai, kini bisa didapatkan tidak lebih dari seperenam harga sebelumnya. Penurunan harga ini membuat akses petani terhadap alat modern semakin terbuka, baik melalui skema pembelian, kemitraan, maupun sewa melalui Unit Pelayanan Jasa Alsintan.

Agung melihat bahwa manfaat MUD MAX bukan hanya pada kecepatan panen, tetapi juga pada kemampuan menjaga hasil yang sudah ditanam petani berbulan-bulan. Penundaan panen akibat cuaca sering kali menyebabkan gabah rontok dan menurunkan kualitas.

Dengan alat yang bisa masuk ke sawah becek, kehilangan hasil dapat ditekan sehingga keuntungan petani lebih terjaga. Bagi penyuluh, kehadiran MUD MAX menjadi bukti konkret yang bisa ditunjukkan langsung kepada petani tentang manfaat pertanian modern, bukan sekadar teori di ruang penyuluhan.

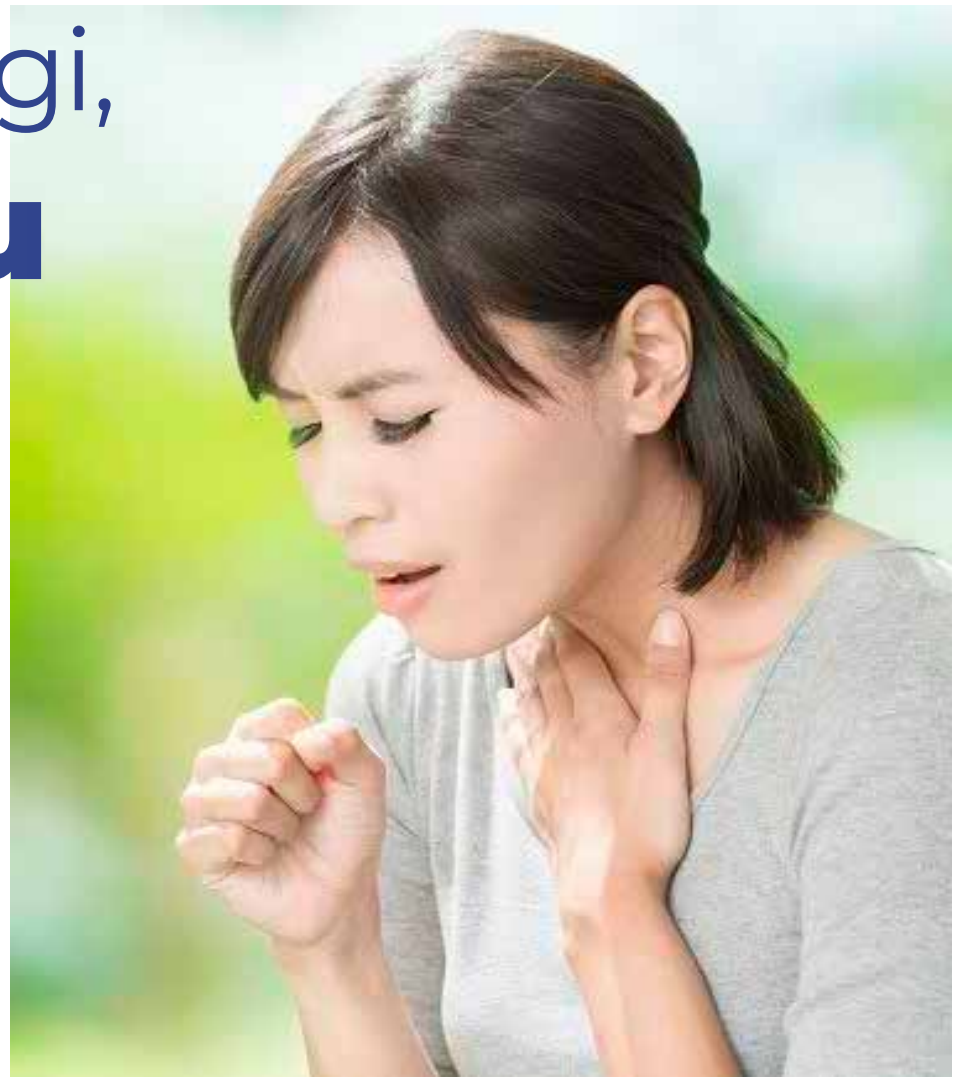
Agung menilai, banyak combine impor dirancang untuk lahan yang relatif kering dan datar sehingga tidak cocok seratus persen dengan sawah Indonesia. Sedangkan MUD MAX sejak awal lahir dari "DNA sawah Nusantara". "Kami berharap penyuluh menjadi jembatan penting agar teknologi ini mampu diterima petani tanpa rasa canggung. teknologi baru hanya akan berhasil jika dirasakan manfaatnya langsung oleh petani dan mudah diadopsi di lapangan," katanya.

Saat ini menurut Agung, pihaknya tengah memulai pengembangan untuk tahap berikutnya, yakni combine berbasis tenaga listrik dan sistem robotik yang lebih ramah lingkungan dan dapat dioperasikan secara semi-autonomous. Harapannya, generasi muda melihat pertanian sebagai sektor masa depan yang keren, tidak kalah dengan industri teknologi lainnya. **Gsh/Yul**

Prototipe MUD MAX

BRMP Mektan mencatat, prototipe Combine Harvester – MUD MAX memiliki lebar kerja 2,05 meter, daya mesin 100 HP, dan bobot 2.905 kilogram. Dengan tekanan tanah (*ground pressure*) sebesar 0,17 kg/cm² dan *ground clearance* 480 mm, alat ini terbukti mampu bekerja optimal di lahan berlumpur dengan daya sangga rendah (*soil bearing capacity* 0,204 kg/cm²).

Curah Hujan Tinggi, **Waspadai Flu Melonjak**



Dalam beberapa minggu terakhir, kasus influenza atau flu dilaporkan meningkat di berbagai wilayah Indonesia. Peningkatan ini sejalan dengan tren global yang dicatat Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Faktor lingkungan dan kondisi cuaca juga sangat mempengaruhi tingginya kasus tersebut.

Perkembangan proporsi pasien positif influenza di Indonesia tahun 2025 menunjukkan tren yang fluktuatif**.** Misalnya, pada 5 Juli, angka proporsi mencapai 22%, namun turun drastis menjadi 4% pada 18 Juli. Setelah itu, terjadi kenaikan kembali menjadi 22% pada 25 Juli, sebelum menurun lagi ke titik terendah 8% pada 1 Agustus.

Tren kemudian meningkat tajam hingga mencapai puncak 34% pada 15 Agustus, disusul penurunan menjadi 26% pada 22 Agustus dan 18% pada 28 Agustus. Memasuki September, proporsi pasien positif tercatat 18% pada 4 September, lalu meningkat ke 26% pada 13 September, sedikit menurun menjadi 24% pada 19 September, dan kembali naik ke 26% pada 25 September.

Data ini memperlihatkan dinamika penularan influenza yang cepat berubah, sehingga memerlukan kewaspadaan dan pemantauan berkelanjutan dari masyarakat serta pemerintah. Lonjakan kasus Human Metapneumovirus (HMPV) menjadi sorotan setelah Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan 79 kasus pada awal 2025. Jika dihitung sejak 2023, total kasus HMPV di Jakarta mencapai 214 kasus, dengan tren meningkat dari tahun ke tahun.

Kasus ini menimbulkan kekhawatiran karena HMPV dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, serta segera berkonsultasi ke tenaga medis bila mengalami gejala berkelanjutan.

Risiko penularan keduanya lebih tinggi pada kelompok dengan daya tahan tubuh lemah, balita, lansia, dan penderita penyakit kronis. Influenza sering dipicu oleh faktor imunitas dan kondisi tubuh yang kurang fit, sementara HMPV banyak ditularkan melalui udara, kontak langsung, maupun kebersihan yang buruk.

Vaksin dan Kesadaran Lingkungan

Pakar kesehatan pernapasan IPB University, Dr dr Desdiani, SpP, MKK, MSc (MBioEt), mengingatkan pentingnya vaksinasi influenza dan kesadaran lingkungan sebagai faktor penting dalam menghadapi lonjakan kasus flu belakangan ini. Lonjakan kasus ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kesehatan individu, tetapi juga dinamika lingkungan dan perubahan iklim.

Suhu udara rata-rata di Indonesia pada September 2025 mencapai 26,91°C, sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata klimatologis 26,56°C. “Anomali suhu ini merupakan yang tertinggi ketujuh sejak 1981 dan berpotensi meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap infeksi saluran pernapasan,” ujarnya seperti dikutip dari laman *IPB University*.

Selain itu, fluktuasi suhu diurnal (perbedaan suhu antara siang dan malam hari) belakangan ini cenderung semakin besar. Bahkan, variabilitas suhu per jam kini mencapai 4–5°C. Misalnya, saat ini jam 12 siang suhu bisa mencapai 37°C, lalu 1 jam kemudian turun menjadi sekitar 32,5°C. “Begitu seterusnya. Jadi tiap jam suhu udara bisa berubah-ubah,” ujarnya.

Kondisi tersebut, menurutnya, membuat sistem pertahanan saluran pernapasan menurun, sehingga virus influenza menjadi lebih mudah masuk dan menginfeksi tubuh. Perbedaan suhu yang ekstrem antara siang dan malam hari dapat menurunkan imunitas lokal saluran napas. “Saat tubuh belum sempat beradaptasi dengan perubahan suhu yang cepat, risiko terinfeksi virus influenza meningkat,” katanya.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan puncak musim hujan akan berlangsung pada November 2025 hingga Februari 2026, dengan intensitas curah hujan normal hingga di atas normal di sebagian besar wilayah Indonesia.

Dalam keterangan resminya, Kepala BMKG menjelaskan bahwa kondisi atmosfer saat ini menunjukkan penguatan Monsun Asia, anomali suhu muka laut positif, dan peningkatan uap air di atmosfer. Ketiga faktor tersebut mendorong terjadinya peningkatan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia.

“Kondisi suhu muka laut yang lebih hangat meningkatkan penguapan dan memperkaya uap air di atmosfer. Hal ini menjamin pasokan air permukaan melimpah, yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk irigasi pertanian dan pengisian waduk,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam Jumpa Pers Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Puncak Musim Hujan 2025/2026 di Jakarta, Sabtu (1/11).

Perubahan Iklim

Desdiani menambahkan, perubahan iklim, urbanisasi, dan polusi udara turut memperkuat penyebaran penyakit. Peningkatan jumlah bangunan dan berkurangnya ruang hijau menyebabkan suhu mikro di daerah padat penduduk menjadi lebih tinggi.

Pada waktu bersamaan, polutan seperti aerosol turut menurunkan kualitas udara dan memperlemah daya tahan tubuh. Kondisi ini mempercepat penyebaran virus influenza tipe A dan B yang menjadi penyebab utama wabah musiman.

“Perubahan suhu dan kelembapan dapat memengaruhi stabilitas virus di udara. Udara kering atau dingin menurunkan efektivitas sistem pertahanan mukosa saluran napas, sehingga seseorang lebih mudah tertular,” jelasnya.

Selain faktor lingkungan, vaksinasi influenza tahunan juga menjadi langkah penting untuk mencegah kasus berat dan komplikasi. Vaksinasi terbukti efektif menurunkan risiko rawat inap, pneumonia, dan kematian, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta individu dengan penyakit kronis atau imun lemah.

Meski efektivitas vaksin dapat menurun pada usia lanjut, ia menekankan bahwa manfaatnya tetap signifikan dalam mengurangi tingkat keparahan penyakit. Vaksin katanya, bukan hanya melindungi individu, tetapi juga membantu membangun kekebalan komunitas, sehingga dapat menekan potensi wabah luas.

Karena itu, Desdiani mengingatkan, pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk etika batuk, penggunaan masker saat sakit, serta menjaga kebersihan udara dan lingkungan. Perubahan iklim dan penurunan kualitas udara menurutnya, bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga masalah kesehatan publik.

Karena itu, mitigasi lingkungan harus menjadi bagian dari strategi pencegahan penyakit menular. Ia pun berpesan vaksinasi influenza dan kesadaran lingkungan harus berjalan beriringan. Di tengah kondisi iklim yang semakin ekstrem, dua hal ini menjadi kunci utama untuk menjaga daya tahan masyarakat dan mencegah wabah besar. **Yul**

Barlie, Karya dari Kisah Tak Terduga

Dunia tanaman hias tanah air kembali mendapat warna baru. Seorang penyilang otodidak asal Indonesia, Barlian atau yang akrab disapa Barlie, sukses menciptakan varietas Aglaonema Alanaqu, tanaman hias berkarakter kuat dan berpenampilan unik yang kini ramai diperbincangkan di kalangan pecinta aglaonema.



Barlie baju hitam

Aglaonema saat ini menjadi salah satu tanaman populer karena penampilannya yang fantastis dan eksotis serta perawatan yang mudah. Dikenal sebagai "si ratu daun" yang artinya memiliki keindahan daun sempurna. Tanaman ini tidak hanya disukai pecinta tanaman hias saja, namun juga para pemula.

Salah satu yang terjun ke dunia aglaonema adalah Barlie. Perjalanan Barlie di dunia aglaonema berawal dari ketertarikannya pada tanaman hias tersebut sejak tahun 2006. Dirinya terinspirasi karya fenomenal Greg Hambali, maestro aglaonema Indonesia, melalui varietas legendaris *Pride of Sumatera*.

Dari sanalah semangat Barlie tumbuh untuk menciptakan silangan aglaonema baru yang tak kalah memikat. "Tidak ada yang instan," ujar Barlie menggambarkan proses panjang yang ia tempuh.

Eksperimen penyilangan dirinya jalani secara otodidak, dengan ketelatenan dan kesabaran tinggi selama bertahun-tahun. Akhinya usaha kerasnya tersebut membuahkan hasil. Beberapa varietas dengan ciri khas berbeda baik dari segi bentuk daun, corak, maupun warna.

Puncak perjalanan Barlie terwujud pada lahirnya Aglaonema Alanaqu, varietas baru yang resmi hadir pada Mei 2023 dan diperkenalkan ke publik melalui akun Instagram-nya (@barlie_alzhamora) pada April 2024.

Alanaqu segera menarik perhatian para kolektor aglaonema karena tampil dengan karakteristik yang kuat dan mencolok. Kombinasi warna daun hijau segar dengan semburat kuning cerah dan motif silver yang tegas menjadikannya berbeda dari varietas lainnya.

Bentuk daun bergelombang, tebal, dan tangkai berwarna putih pendek menambah kesan elegan sekaligus tangguh. Menariknya, warna dan corak Alanaqu ternyata muncul di luar ekspektasi.

"Awalnya saya menggunakan dua indukan, Chaowang dan Precusor, yang dikenal memiliki warna merah khas. Tapi hasil akhirnya justru mengejutkan, muncul warna hijau, kuning cerah, dan silver. Hasil yang tak terduga, tapi sangat indah," ungkap Barlie.

Simbol Kreativitas

Keberhasilan Barlie menciptakan Aglaonema Alanaqu menandai lahirnya kembali semangat inovasi penyilang lokal setelah era Greg Hambali. Di tengah sedikitnya penyilang aglaonema di Indonesia, karya Barlie menjadi bukti bahwa kreativitas dan ketekunan mampu menghasilkan varietas unggul yang membanggakan.

Barlie berharap kehadiran Alanaqu dapat menginspirasi para penyilang muda untuk terus berinovasi. "Semoga Alanaqu menjadi karya yang bisa dinikmati keindahannya oleh semua pencinta aglaonema, dan mendorong lahirnya lebih banyak silangan lokal yang membanggakan Indonesia," ujarnya.

Kini, Aglaonema Alanaqu tak hanya menjadi primadona baru di dunia tanaman hias, tetapi juga simbol bahwa karya anak bangsa mampu menembus pasar dengan kreativitas dan keunikan yang tak kalah dari varietas mancanegara.

Ilman/Herman

Info Pusdiktan

Program YESS, Bawa Putri Anggraini Taklukan Pasar Modern

Keluar dari zona nyaman dari salah satu BUMN justru membawa semangat berwirausaha, Putri Anggraini Wulansari untuk mendirikan usaha Produksi Kopi Bubuk Murni di Kota Tulungagung, Jawa Timur. Dengan bendera Inbeans Kopi, Putri berhasil menembus pasar modern.

Visi yang jelas. Itulah yang tampak dari Putri, generasi muda Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dalam mengembangkan usahanya agar berbeda dengan yang lain. Lahir di Tulungagung pada 11 April 1995, Putri mengambil langkah berani meninggalkan karier di PT Pertamina demi mengikuti panggilan hati di dunia pertanian.

Lulusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang ini sempat menikmati kehidupan stabil sebagai karyawan. Namun, rutinitas di depan komputer membuatnya bertanya: "Apakah ini arti sukses yang sebenarnya?" Dari sanalah muncul keputusan besar: meninggalkan zona nyaman dan membangun usaha sendiri.

Inspirasi datang saat mengunjungi kebun kopi milik seorang teman di Malang. Dirinya melihat peluang besar, petani hanya menjual biji mentah tanpa nilai tambah dan menjual kopi ke tengkulak. Putri akhirnya memutuskan mengolah kopi menjadi produk bernilai lebih tinggi. Berbekal modal Rp1 juta tahun 2017, ia memulai usaha kecil bernama AW Coffee yang memproduksi kopi bubuk sebanyak 20 kg dengan kemasan 150 gram.

Meskipun menghadapi tantangan awal dalam pemasaran, Putri tidak patah semangat. Mulai menawarkan dan menjual kopi bubuknya ke berbagai tempat seperti pusat oleh-oleh, swalayan, minimarket, dan warung kopi di Tulungagung, Trenggalek, Blitar dan Kediri.

Dirinya menghadapi penolakan yang justru menjadi pendorong semangat untuk terus berkembang, tidak menyerah dan menjadi pelajaran. Perlahan, peluang mulai terbuka lewat pameran-pameran daerah. Kesempatan emas datang ketika ia mengikuti pameran di Surabaya.

Dukungan positif ini memotivasinya mengurus izin edar resmi. Kemudian lahir merek INBEANS Coffee, lengkap dengan sertifikasi HAKI. Dengan brand ini, Putri berhasil menembus jaringan ritel modern seperti Transmart Carrefour dan Alfamart di Jawa Timur, meski harus menghadapi tantangan arus kas yang ketat.

Tahun 2021 menjadi titik balik besar ketika Putri bergabung dalam Program YESS. Melalui pelatihan dan dukungan dana hibah, kapasitas produksinya melonjak dari 90 kg menjadi 500 kg per bulan. Jaringan pemasaran pun semakin luas, menjadikan INBEANS salah satu contoh sukses transformasi petani milenial di sektor kopi.

Pada tahun 2021, perjalanan usaha Putri semakin terbuka ketika mendapatkan informasi tentang Program YESS, sebuah inisiatif untuk menciptakan wirausahawan muda di bidang pertanian. Melalui program ini, ia mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Proposal Bisnis yang membuka wawasannya dalam mengelola usaha pertanian.

Dengan tambahan Dana Hibah Kompetitif Rp 50 juta pada tahun 2022, usahanya semakin berkembang. Perubahan signifikan terlihat pada peningkatan kapasitas produksi. Jika awalnya hanya 90 kg/bulan, kini mencapai 500 kg/bulan. Langkah strategis ini tidak



hanya meningkatkan daya saing produknya, tetapi juga membuka peluang baru dalam jejaring pasar. Bahkan produk kopinya, kini terpanjang di retail modern.

Putri menjadi contoh sukses dari perpaduan semangat berwirausaha, keberanian mengikuti program pendukung, dan dedikasi untuk terus belajar dan berkembang. Bersama Inbeans Coffee, Putri memberdayakan petani kopi, membuka lapangan pekerjaan, dan memberikan kontribusi positif bagi industri kopi bubuk murni.

Program YESS Pusdiktan


TABLOID Sinar Tani
Keluarga besar Tabloid Sinar Tani Mengucapkan
Selamat & Sukses
Atas Dilantiknya
Prof. Dr. Arif Satria
Sebagai
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia
Semoga Amanah dan selalu diberikan Keberkahan dalam menjalankan Tugasnya


TABLOID Sinar Tani
Selamat
HARI PAHLAWAN
10 November
PETANI
PAHLAWAN
PANGAN
Merekalah Pahlawan
TanpaTanda Jasa
Jangan lupakan peran mereka
menyediakan pangan untuk kita semua

Prof. Arif Satria
Nahkoda Baru BRIN



Setelah sempat digadang-gadang menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), akhirnya Presiden Prabowo resmi menunjuk Prof. Arif Satria (Rektor IPB University) menjadi Kepala BRIN menggantikan Tri Handoko, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/11). Perubahan ini menandai babak baru kepemimpinan riset dan inovasi nasional. Bersamaan dengan itu, Amarulla Octavian dilantik sebagai Wakil Kepala BRIN.

Sebelum memimpin BRIN, Arif adalah Rektor IPB University untuk dua periode, 2017–2022 dan 2023–2028. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 123/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BRIN.

Dengan pengalaman Arif di dunia pendidikan dan riset, Presiden Prabowo berharap BRIN dapat lebih berperan dalam pengembangan inovasi dan riset yang mendukung kemajuan industri tanah air. Pelantikan ini menandai babak baru kepemimpinan di lembaga riset terbesar Indonesia, dengan harapan menghadirkan inovasi yang lebih nyata bagi masyarakat.

Arif sendiri menekankan pentingnya integritas dan kerja keras. Ia berjanji akan memimpin BRIN dengan prinsip transparansi, meritokrasi, dan kolaborasi. “Tugas kita bukan sekadar jabatan, tapi bagaimana hasil riset dan inovasi benar-benar bermanfaat untuk rakyat dan pembangunan bangsa,” katanya.

Sebagai nahkoda baru BRIN, Arif diharapkan bisa menjadi motor penggerak riset yang lebih proaktif, menghasilkan inovasi yang mendukung swasembada pangan, teknologi, dan penguatan daya saing industri nasional.

Jika melihat latar belakang pendidikan, maka Arif sangat kentara dengan dunia riset. Menjalani pendidikan dasar hingga menengah atas di Pekalongan, Ia mendapat gelar sarjana dari IPB mengambil program pendidikan ilmu ekonomi pertanian yang diselesaikan tahun 1995.

Ia kemudian menjalani pendidikan magister sosiologi pedesaan di IPB hingga tahun 1999. Gelar doktor ia peroleh pada tahun 2006 dari Department of Marine Social Science Universitas Kagoshima. Pada tahun 2019, ia diangkat menjadi guru besar tetap dalam bidang ekologi-politik di IPB.

Arif sempat terpilih sebagai Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) untuk periode 2010- 2017 yang menjadikan dekan termuda di IPB. Ia turut terlibat dalam penyusunan berbagai kebijakan terkait kelautan dan perikanan, termasuk penyusunan UU Perikanan No. 31/2004, Revisi UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, penyusunan Konsep Ekonomi Biru, dan sejumlah Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri.

IPB jadi Kampus Agro Maritim

Keahliannya banyak berkaitan dengan ekonomi pertanian, sosiologi pedesaan, hingga kebijakan maritim. Ia juga dikenal melalui gagasannya tentang ekonomi biru dan kebijakan pengelolaan pesisir serta pulau-kecil. Karena itu, saat menjadi Rektor IPB University, Arif kerap mendorong IPB menjadi kampus Agro-Maritim.

Banyak perubahan lain yang terjadi di kampus. Bahkan saat kepemimpinannya, IPB (Institut Pertanian Bogor) berubah menjadi IPB University. IPB yang sebelum dikenal sebagai Kampus Pertanian, kini membuka berbagai Fakultas, Jurusan dan Program Studi baru. Salah satunya yang paling fenomenal adalah Fakultas Kedokteran.

Selama kepemimpinannya, IPB University mengalami transformasi signifikan melalui inisiatif Global *South Leadership in Innopreneurship*. Strategi ini membawa IPB menjadi salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di dunia dalam bidang pertanian dan biosains tropika

Di bawah kepemimpinannya, IPB berhasil menempati peringkat ke-45 dunia, peringkat ke-8 Asia, dan peringkat ke-1 Asia Tenggara dalam QS World University Rankings by Subject untuk bidang Agriculture and Forestry. Selain itu, dalam THE Impact Rankings, IPB juga masuk dalam 100 besar dunia, menunjukkan komitmen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pada tahun 2023, IPB meraih peringkat ke-1 dunia untuk SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan menjadi The Best SDGs University versi Bappenas selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024).

Ia kerap menjadi pembicara dalam seminar nasional, lokakarya, dan konferensi Internasional. Misalnya, delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Rio +20 yang diselenggarakan PBB di Rio de Jeneiro, Brasil, pada tahun 2012. Ia juga menjadi *speaker* dalam *high official* forum yang diselenggarakan oleh FAO di Roma pada tahun 2019.

Sebagai seorang akademisi, Arif Satria pernah mendapatkan Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa tahun 2009 dalam Bidang Ilmu Pengetahuan dari Mendiknas. Setahun sebelumnya, ia meraih Yamomoto Award 2008, yakni *The First Winner of the JIFRS Yamamoto Prize for the Best Paper* pada I*nternational Institute of Fisheries Economics and Trade* (IIFET) Conference, Juli 2008, di Nha Trang, Vietnam. IIFET adalah organisasi profesi bidang sosial ekonomi perikanan yang sekretariatnya terdapat di Oregon State University, USA.

Pada tahun 2013, ia meraih Penghargaan Akademisi Peduli Penyuluhan dan SDM Perikanan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2019, ia juga mendapatkan *Second Winner of The Academic Leader Award* selaku Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Rektor PTNBH (2019). Kini Arif menjadi nahkoda baru BRIN, kita tunggu langkahnya. **Yul**

Aktivis Sejak Mahasiswa

Dalam organisasi, sejak masih di Kampus IPB, Arif termasuk salah satu mahasiswa yang aktif dalam berbagai organisasi. Hal tersebut kemudian terbawa hingga ia berkarir sebagai dosen. Bahkan selama menjalani pendidikan program doktoral di Jepang, ia menjadi Ketua PPI Kagoshima Jepang pada tahun 2004 dan menjadi Ketua Dewan Redaksi Majalah Inovasi PPI Jepang tahun 2004 hingga 2005.

Organisasi lain:

1. Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan (2012-2019).
2. Tim Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan (2001–2002).
3. Anggota Dewan Pengawas Perum Perikanan Indonesia (2013–2017)
4. Anggota Dewan Kelautan Indonesia (2013–2017)
5. Anggota Komisi Tuna Indonesia (2012–2014)
6. Anggota Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (2008–2011).
7. Organisasi profesi internasional juga pernah diikuti seperti *American Fisheries Society*, *International Institute of Fisheries Economics and Trade (IIFET)*, *International Association of the Commons*, *Japan Regional Fisheries Society*, *Japan International Fisheries Research Society.*
8. Wakil Ketua Umum Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (2009–2011)
9. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) periode 2010–2015
10. Ketua Dewan Pakar PISPI periode 2015–2020.
11. Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Bogor
12. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
13. Chairman University Network for Indonesian Export Development (UNIED) (2018–2019).
14. Ketua Forum Rektor Indonesia (2020).


TABLOID Sinar Tani
SINARTANI.COM
SINTA TV
OPEN SPACE
SOCIAL MEDIA ADVERTISING !!
tabloidsinartani
tabloidsinartani.com
2.486 posts
7.355 followers
648 following
@tabloidsinartani
tabloidsinartani.com
Followed by kyrie_304
Following
Message
Contact
EDISI 4109
EDISI 4107
EDISI KHUSUS
11.19
Informasi PERTANIAN Terkini
SINTATV
@SINTATV
tabloidsinartani.com and 1 more link
Subscribed
Videos
Shorts
Live
Podcasts
Latest
Popular
Oldest
"Keracunan Anggur", Ubah Hidup Aat
465 views · 10 days ago
16:14
27:06
3:38
SINTATV
Benefit :
• Jangkau Tanpa Batas!
• Tepat Sasaran, Tepat Waktu!
• Raih Engagement Tinggi
(021) 7812162
081317575066
redaksi@sinartani.co.id

Peringati Hari Pahlawan, Mentan: Pejuang Pertanian juga Pahlawan



Setiap 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Memperingati Hari Nasional tersebut, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memberikan apresiasi kepada seluruh pejuang di bidang pertanian, mulai dari petani, penyuluh, hingga para inovator teknologi. Mereka adalah pahlawan masa kini yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Menurut Amran, makna kepahlawanan harus dimaknai secara lebih luas dan kontekstual. Tidak hanya mereka yang berjuang di medan perang, namun juga mereka yang bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan bangsa. "Kita perlu memberi makna baru terhadap istilah pahlawan," ujarnya saat Reuni Akbar Alumni ITS di Graha ITS, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (9/11).

Pemberian makna pahlawan yang lebih luas menurut Amran, merupakan bentuk apresiasi untuk menumbuhkan semangat berinovasi dan berkarya di bidang pertanian. Mekanisasi dan inovasi teknologi pertanian merupakan keniscayaan untuk mencapai target swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Amran mengingatkan, semangat kepahlawanan tidak hanya lahir di medan perang, tetapi juga tumbuh dari kerja keras para petani, penyuluh, dan pegawai pertanian yang berjuang mewujudkan kedaulatan pangan bangsa.

"Hari ini kita mengenang pahlawan yang telah mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan. Tapi perjuangan belum selesai. Kini perjuangan itu kita lanjutkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Para pejuang itu adalah Anda semua, pahlawan pangan Indonesia," tegasnya.

Amran menegaskan, semangat kepahlawanan harus diwujudkan dalam kerja nyata. Ia mengingatkan bahwa banyak pegawai dan petugas lapangan yang bekerja tanpa mengenal waktu demi menjaga ketahanan pangan nasional. Dalam kesempatan itu, ia mencontohkan beberapa pegawai yang mengalami kecelakaan dan jatuh sakit saat bertugas. Ia menyebut mereka sebagai pahlawan sejati.

"Mereka jatuh karena berjuang untuk swasembada. Mereka adalah pahlawan pangan kita. Biaya perawatan mereka akan kami tanggung, bukan sebagai Menteri, tapi sebagai sesama pejuang Merah Putih," ujarnya.

Amran juga mengapresiasi seluruh pegawai Kementan atas berbagai capaian luar biasa dalam satu tahun terakhir. Ia menyebut, Indonesia kini berada di ambang deklarasi swasembada beras, sebuah prestasi yang menurutnya dicapai melalui kerja keras bersama, bukan karena kepemimpinan satu orang semata.

"Insya Allah, dalam waktu dekat Indonesia bisa mendeklarasikan swasembada pangan. Ini bukan keberhasilan saya, tapi keberhasilan Anda semua. Anda adalah pahlawan-pahlawan pangan yang membuat bangsa ini berdaulat," ucapnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan sederet capaian lain Kementan. Mulai dari peningkatan status laporan keuangan dari WDP menjadi WTP oleh BPK, reformasi birokrasi dengan nilai tinggi dari Kemenpan RB, hingga pengakuan KPK atas komitmen Kementan terhadap integritas dan antikorupsi. "Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional kini menjadi yang tertinggi dalam sejarah," katanya.

Amran pun mengingatkan pentingnya meritokrasi dan objektivitas dalam menilai kinerja pegawai. Untuk itu, Ia meminta seluruh pejabat eselon untuk memberi ruang bagi laporan dan aspirasi tanpa rasa takut, serta menegakkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia.

"Saya ingin yang berprestasi diapresiasi, yang salah diperbaiki. Kalau ada yang merasa terzolimi, laporkan langsung. Kita ingin Kementan menjadi rumah yang adil bagi semua," katanya.

Amran kembali menegaskan, bahwa perjuangan pahlawan masa kini adalah bekerja, melayani, dan memberi manfaat bagi bangsa. Ia menyebut, semangat 'bekerja, bergerak, dan berdampak' menjadi bentuk nyata penghormatan kepada para pahlawan bangsa.

"Pahlawanku, teladanku. Kita lanjutkan perjuangan dengan kerja keras, keikhlasan, dan cinta tanah air. Kedaulatan pangan adalah bentuk pengabdian tertinggi bagi Indonesia," ujarnya. **Yul**

Untuk Milenial, BULOG Buka Ruang Kemitraan Hulu-Hilir



Peluang bisnis di sektor pangan terbuka luas, terutama bagi generasi muda. Karena itu, BULOG membuka ruang kemitraan, terutama bagi generasi muda yang ingin terjun ke dunia pertanian.

Saat Nusantara Food Summit 2025 yang digelar di ICE BSD City, Tangerang (6/11) bertema, Food Security 2.0: Mewujudkan Kemandirian Pangan dengan Membangun Kembali Sistem Pangan dan Peras Strategis Generasi Muda, Direktur Bisnis Perum BULOG, Febby Novita mengatakan, Bulog mengelola jaringan distribusi pangan bernama Rumah Pangan Kita (RPK) yang kini telah berkembang menjadi lebih dari 27.000 jaringan di seluruh Indonesia.

"Adik-adik Gen Z bisa ikut mendistribusikan beras SPHP, minyak, gula, dan komoditas lainnya hanya bermodal Rp2,5 juta sampai Rp5 juta. Tidak perlu punya toko, cukup dari rumah dengan dukungan platform digital. Dan di situ bisa dapat cuan," katanya.

Selain itu, BULOG membuka ruang kemitraan dari sisi hulu hingga hilir, mulai dari kerja sama on-farm dengan petani dan gapoktan, penyediaan bahan baku untuk pabrik-pabrik penggilingan BULOG di sentra produksi, hingga pengembangan gudang komoditas untuk memperkuat kapasitas cadangan pangan.

"Kapasitas gudang kami saat ini mencapai 3,8 juta ton, namun kebutuhan terus bertambah seiring peningkatan produksi dalam negeri. Generasi muda yang punya lahan bisa membangun gudang komoditas dan bekerja sama dengan BULOG," ungkap Febby.

Febby menjelaskan, situasi pangan nasional menunjukkan perkembangan positif. "Alhamdulillah, di tahun 2025 ini Indonesia tidak melakukan impor beras. Ini merupakan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan dalam negeri," ujarnya.

Ia menegaskan, BULOG berperan pada dua sisi sekaligus: menyerap gabah/beras petani di hulu dan menstabilkan harga pangan di hilir. Ketika harga pangan naik di suatu daerah, BULOG harus turun untuk melakukan operasi stabilisasi.

Dalam diskusi mengenai kondisi surplus beras nasional 2025 dengan produksi setara 34 juta ton dan konsumsi 31 juta ton, Febby menegaskan pentingnya keberadaan cadangan pangan pemerintah. "Pemerintah tidak boleh mengambil risiko. Ketersediaan beras harus tetap terjamin di seluruh wilayah, termasuk di daerah-daerah sulit akses seperti pegunungan Papua, meskipun biaya distribusinya tinggi," katanya. **Yul**

TABLOID SinarTani

Trend Positif 2025
PRODUKSI PANGAN NASIONAL



Total Produksi Beras

2024	2025
30,37 Juta Ton	34,77 juta ton

(NAIK 13,54%)

Total Produksi Jagung

2024	2025
15,14 Juta Ton	16,55 Juta Ton

(NAIK 9,40%)

